

**KONSEP MORAL DALAM BUKU *EKSISTENSIALISM
IS A HUMANISM* KARYA JEAN PAUL SARTRE
SKRIPSI**

Diajukan Kepada
Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi
Jurusan Psikologi dan Psikoterapi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)



Disusun Oleh :
MUHAMMAD FATKHUR ROKHMAN
NIM. 181121041

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammd Fatkhur Rokhman

NIM : 181121041

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 15 oktober 1998

Progam Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora

Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah

Judul Skripsi : Konsep Moral Dalam Buku

Existentialism is a Humanism Karya Jean Paul Sartre

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukm.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 23 November 2022

Penulis,



(Muhammad Fatkhur. R)

Drs. Yusup Rohmadi, M.Hum
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi sdr

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap proposal saudara ..

Nama : Muhammad Fatkhur Rokhman

NIM : 191121041

Judul : Konsep Moral Dalam Buku

Existentialism is a Humanism Karya Jean Paul Sartre

dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada Sidang Munaqhosah Program Studi Akdah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 23 November 2022

Pembimbing,



Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum

NIP. 196302021994031003

HALAMAN PENGESAHAN
KONSEP MORAL DALAM BUKU *EKSISTENTIALISM*
IS A HUMANISM

Disusun Oleh :

Muhammad Fatkhur Rokhman

NIM. 181121041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Pada Hari Jum'at Tanggal 23 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Guna memperoleh gelar S.Ag

Surakarta, 28 Desember 2022

Penguji Utama

Dr. Imam Sukardi, M. Ag

NIP. 19631021 199403 1 001

Penguji II/Ketua Sidang

Penguji I/Sekretaris Sidang

Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum
NIP. 19630202 199403 1 003

Dr. Raden Lukman Fauroni., S.Ag., M.Ag
NIP. 19720902 200901 1 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. Islah, M.Ag
NIP. 19730522 200312 1 001

Motto

“Tidak ada legislator terbaik melainkan diri kita sendiri”

Jean Paul Sartre

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua dan semua pihak yang telah berjasa dalam setiap bagian hidup.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayahNya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., beserta sahabat dan keluarganya.

Skripsi berjudul Konsep Moral Dalam Buku *Existentialism is a Humanism*, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta.

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Islah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dra. Hj. Siti Nurlaili Muhadiyatiningih, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.
4. Alfina Hidayah, M.Phil., selaku wali studi, terimakasih atas semua ilmu dan bimbingan yang diberikan selama ini, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
5. Drs. Yusup Rohmadi, M.Hum., selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kearifan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk bersedia memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dewan penguji, selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, catatan dan koreksi terhadap skripsi sehingga menjadi lebih baik.
7. Bapak dan Ibu dosen FUD, khususnya dosen program studi Aqidah dan Filsafat Islam yang telah memberikan ilmu selama ini.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.
9. Seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah berjasa, karena telah memberikan akses terhadap buku-buku dan sumber literasi lainnya.
10. Ayah dan Ibu tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan moral dari waktu ke waktu dan memberikan pelajaran berharga mengenai sabar dan proses dalam kehidupan.
11. Teman-teman AFI satu angkatan yang selalu berbagi dukungan dan memberikan saran dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik yang membangun akan sangat membantu. Semoga dengan skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, 23 November 2022

Penulis

Daftar Isi

Pernyataan Keaslian	i
Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	X
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat dan Kegunaan	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	13
Bab II Pokok Eksistensi alisme Jean paul Sartre	14
A. Siapa Jean Paul Sartre ?	14
B. Pokok Eksistensialisme Jean Paul Sartre	18
C. Karya Jean Paul Sartre	19
Bab III Diskursus Moral	22
A. Pengertian Moral	22
B. Pengertian Etika dan Etiket	23
C. Pengertian Norma	24
D. Teori Moralitas	25

E. Moralitas Pancasila	28
Bab IV Moral Dalam Pemikiran Jean Paul Sarre	31
A. Pandangan Moral Dalam Buku <i>Eksistentialism is a Humanism</i>	31
B. Konsep Moral Jean Paul Sartre dan Relevansinya dengan konsep Pancasila	37
C. Analisis Moral Jean Paul Sartre	40
Bab V Penutup	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu filsuf bernama Jean Paul Sartre mengatakan bahwa manusia itu dihukum untuk bebas oleh Tuhan dalam pemikiran Eksistensialismenya, namun seiring waktu kebebasan itu akan bertubrukan dengan kebebasan orang lain.¹ Dalam hal ini manusia perlu memperhatikan batasan-batasan yang memungkinkan agar kepentingannya berupa hak dan kebebasan tidak merenggut hak dan kebebasan orang lain. Dengan begitu semua orang akan terlindungi instrumen-instrumen kehidupannya. Dan tentu saja hal tersebut tidak dengan mudah dapat dicapai ketika tidak ada batas-batas yang konkret mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Ajaran mengenai baik dan buruknya sesuatu tersebut adalah apa yang disebut sebagai moral. Manusia sebagai makhluk yang memiliki hati nurani yang sebenarnya sudah memiliki konsep dasar dari moralitas itu dari awal, tapi cenderung sering terjegal dengan ego atas kepentingan diri sendiri. Dan terkadang konsep moral antara satu dengan yang lain cenderung berbeda. Seperti misal moralitas yang ada antara suku Jawa dengan suku yang lain cenderung memiliki perbedaan yang banyak dari berbagai segi.

Isu moral sampai saat ini masih menjadi pembahasan yang tidak lekang oleh waktu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pun agaknya tidak selalu menghembuskan angin segar, tapi juga membuka jalan baru bagi perilaku yang tidak dapat dibenarkan mendapat inovasi atau variasi cara agar dapat merauk keuntungan yang lebih besar dengan jumlah korban yang semakin banyak.² Hal tersebut cenderung biasa dilakukan oleh remaja dimana pada usia-usia tersebut remaja memulai tahap pencarian jati diri dengan imitasi/menirukan. Hal yang seperti ini sudah seharusnya menjadi perhatian

¹ T. Z. Lavine, *From Socrates To Satre* (Yogyakarta: Immortal Publishing dan Octopus, 2020), h. 26.

² Yunita Dwi Setyoningsih, "Tantangan Konselor di era milenial dalam mencegah degradasi moral remaja," in *Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling*, vol. 2, 2018, h. 134.

masyarakat terutama para orang tua yang memiliki kewajiban untuk membimbing anak mereka agar jauh dari hal yang seperti itu³.

Persoalan moralitas dari yang paling dini yaitu anak-anak lalu remaja, jika remajanya sudah mulai bobrok mau dikemanakan masa depan bangsa. Bukan hanya remaja saja, bahkan dewasa pun sudah mulai acuh terhadap nilai moral yang berlaku di daerahnya. Bahkan sikap acuh tersebut naik ke level dimana terdapat sebuah kebiasaan untuk mengatakan “hidupmu adalah hidupmu, hidupku adalah hidupku”, dengan begitu mereka mengacuhkan saran dan kritikan yang sekiranya akan bermanfaat untuk mereka. Tidak perlu melihat terlalu jauh, kita sendiri pun terkadang merasa kalau diberi nasehat atau masukan cenderung masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Mungkin tidak bisa disepadankan dengan kalimat yang dicontohkan tadi, namun bisa jadi itulah awal mula atau bibit dari tumbuhnya sikap acuh terhadap masukan orang lain yang bisa jadi itu adalah sikap mengingatkan dari orang lain bahwa kita telah melakukan perlakuan amoral terhadap sesuatu.⁴

Para orang dewasa sudah seharusnya menjadi contoh berperilaku yang benar dan baik, karena telah lebih dulu makan asam garam kehidupan. Bisa dicontohkan di realita sekitar kita atau para petinggi pemerintahan banyak orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan banyak kategori-kategori tambahan dalam perilaku tidak bermoral lainnya dikarenakan oleh satu tindakan mereka yaitu korupsi. Tentunya hal ini hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atas sesuatu sehingga bisa memanipulasi keadaan. Akibat dari korupsi sendiri yaitu kemiskinan, dimana banyak tindak kriminalitas yang datang dari garis ekonomi bawah bahwa mau tidak mau mereka melakukan tindak kejahatan dan kriminalitas karena paksaan kondisi ekonomi. Selain

³ Syaparuddin dan Elihami, “Peranan Pendidikan Nonformal dan Sarana Pendidikan Moral,” *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 1 (2019), h. 173.

⁴ Gema Budiarto, “Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral dan Karakter,” *Jurnal Pamator* 13, no. 1 (2020), h. 51.

dibidang ekonomi, korupsi juga turut merusak di beberapa bidang seperti pendidikan dan kesehatan.⁵

Penyebab dari salah satu perilaku amoral seperti korupsi tidak lain dikarenakan kebiasaan masyarakat yang cenderung menghormati orang yang memiliki kekayaan berlebih di lingkungannya, apalagi kepada seseorang yang sudah naik haji. Sudah menjadi rahasia umum bahwa syarat untuk menjadi orang yang dihormati dalam sebuah lingkup masyarakat salah satunya adalah dengan menjadi orang yang berduit. Memang tidak salah untuk menghormati seseorang atas sesuatu atau menghargai pencapaiannya seperti dari yang bukan apa-apa menjadi seorang yang paling kaya atau menjadi satu-satunya yang naik haji di lingkungan masyarakat tersebut, namun akan menjadi persoalan ketika hal tersebut menjadi satu-satunya jalan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat dalam hal ini adalah penghormatan. Dampak dari hal ini adalah penghambaan terhadap gaya hidup materialisme menjadi semakin mendarah daging atau menjadi sebuah budaya.⁶

Kebudayaan merupakan sebuah simbol atau interpretasi dari karakter suatu masyarakat di daerah tertentu. Dan tentunya tidak ada yang mau daerahnya diketahui mempunyai suatu kebiasaan buruk dan sudah menjadi suatu kebudayaan, dimana hal tersebut diupayakan secara tidak sadar oleh masyarakat. Mudahnya masyarakat dengan tidak sadar telah membumikan beberapa perilaku buruk yang dikemudian hari menjadi ciri dari masyarakat tersebut.

Oleh karena hal itu manusia tidaklah lahir dalam keadaan hina dan tidak bermoral sejak awal, melainkan itu adalah bentukan dari luar dirinya ketika dia dalam proses tumbuh kembang. Manusia terlahir dengan atau tercetus melalui tindakannya, mudahnya manusia secara kasarnya direpresentasikan dan ditentukan oleh tindakannya. Jika manusia

⁵ A Malthuf Siroj, "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya," *al-Ihkam* 11, no. 2 (2016), h. 300.

⁶ Ade Imelda Frimayanti, "Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam," *Al-Tadzkiyyah* 8, no. 1 (2017), h. 85.

hendak mengomunikasikan dirinya dengan Tuhan atau dengan seseorang sudah menjadi barang pasti bahwa tindakan yang akan berbicara. Hampir tidak ditemukan sarana lain selain melalui tindakan itu sendiri. Namun perlu digaris bawahi bahwa tindakan ini haruslah dalam keadaan sadar yang dengan begitu menjadi tidak samar. Peralnya kesadaran adalah syarat yang paling tidak boleh ditinggalkan ketika melakukan tindakan yang mewakili diri kita. Rasionalitaslah yang membedakan kita dengan binatang, maka segala tindakan dan upaya yang dilakukan tidak atas dasar rasionalitas tidak bisa dinilai secara etis. Sama halnya orang gila tidak bisa dikatakan bermoral atau pun amoral dikarenakan dia tidak sedang dalam posisi sepenuhnya manusia.⁷

Namun perlu diketahui juga bahwa mendewakan rasionalitas juga memiliki resiko tersendiri yang akan mengantarkan kita pada perilaku amoral lainnya. Isu moral terjadi karena ada kekosongan spiritual, kata Maslow karena kekosongan nilai menjadikan tidak adanya lagi yang dirindukan, diidolakan, dan diperjuangkan. Dengan begitu maka tidak ada lagi yang mereka persembahkan seperti hidup dan matinya seperti yang pendahulu mereka lakukan. Orang-orang tidak lagi hidup berdasarkan nilai-nilai luhur, namun kerinduan akan nilai-nilai ini akan tetap hidup. Inti dari pemikiran Maslow ini adalah bahwa Sains dia anggap sebagai sesuatu yang semakin busuk setiap saatnya, karena Sains akan membusuk jika mencampakan nilai.⁸

Menurut Zakiyah Daradjat, secara umum perilaku yang bertentangan dengan moralitas cenderung disebabkan oleh kebutuhan hidup yang kian meningkat, rasa individualitas, persaingan dalam hidup, keadaan yang tidak stabil, dan terlepasnya pengetahuan dari nilai-nilai agama. Sedangkan Syed Sajjad Hussain dan Syed Ali Asraf, berpendapat bahwa kini manusia sedang dilanda krisis moral dan kesehatan jiwa sebagai

⁷ Agustinus W Dewantara, *Filsafat Moral : Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017), h. 10.

⁸ Mawardi, "Keragu-raguan Terhadap Agama: Wacana Humanisme dan Eksistensialisme," *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013), h. 283.

akibat dari krisis materialisme. Tradisi hidup berdampingan dengan materialisme tidak membuat moralitas sebagai panutan, tetapi kekayaan menjadi tolak ukur kehormatan dan kemuliaan.⁹

Mengenai moralitas itu sendiri banyak para ahli yang berbeda pendapat dalam hal dasar dari moralitas. Dari beberapa pendapat filsuf dapat dikelompokkan bahwa moralitas ada 3 yang mendasarinya. Yang pertama, adalah kelompok yang mengatakan bahwa moralitas itu berasal dari kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Salah satu filsuf yang mendukung pendapat ini adalah Herbert Spencer, sebagai seorang evolusionis modern Spencer mengatakan bahwa sebagaimana manusia yang beranjak dari hewan kemudian menjadi makhluk berakal bernama manusia, begitupun dengan konsep moral serta gagasan-gagasan yang melatar belakangi hal tersebut, kebiasaan-kebiasaan yang berguna kemudian menjadi suatu adat yang mengakar pada suku primitif sebagai bagian dari moralitas mereka.¹⁰

Kelompok yang beranggapan bahwa tidak ada moralitas yang berasal dari hakikat murni suatu perbuatan tersebut, namun moralitas tercipta/diberikan oleh negara dan filsuf yang memiliki pemikiran ini adalah Thomas Hobbes dan Jean Jacques Rousseau. Mereka mengatakan bahwa sebelum adanya negara maka tidak ada yang namanya baik dan buruk, penjelasannya adalah sebuah negara itu bukan hanya asal tercipta dengan sendirinya, melainkan lewat sosial kontrak dimana masyarakat lewat persetujuan bersama mengorbankan hak-hak tertentu untuk melindungi hak-hak lainnya. Sampai terciptanya *Common Good* yang menjadi pertanda munculnya moralitas publik di daerah tersebut sehingga indikator baik dan buruk menjadi lebih jelas. Dengan begitu jelas bahwa tidak ada baik buruk menurut hakikatnya kata mereka.

⁹ Mochamad Iskarim, "Dekadensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa)," *Edukasi Islamika* 1, no. 1 (2016), h. 3.

¹⁰ Poespoprodjo, *Filsafat Moral : Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, 1 ed. (Bandung: Remaja Karya CV, 1986), h. 104.

Kelompok yang beranggapan bahwa moralitas ditentukan oleh kehendak bebas dari Tuhan yang bisa dikatakan bahwa moralitas mengenai apa yang baik dan buruk seperti yang kita kenal sekarang ini baik yang tertulis atau yang tertanam di dalam ide asal mengenai moral adalah hasil dari nilai yang Tuhan ciptakan sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan tidak memiliki kontradiksi di dalamnya sehingga tidak mungkin Tuhan akan memerintahkan apa yang tidak mungkin Ia perintahkan.

John Duns Scotus berpendapat bahwa semua keharusan itu berasal dari kehendak bebas Tuhan dan bahwa perbuatan seperti perzinahan dan kejahatan pembunuhan pada asal atau hakikatnya adalah buruk. Andai kata hal tersebut tidak Tuhan tetapkan sebagai suatu hal yang buruk menurut hakikatnya maka mereka tidak akan menjadi buruk sehingga dapat disimpulkan bahwa dia mempercayai moralitas intrinsik, tetapi tidak percaya kebenaran dan kesalahan intrinsik.¹¹

Akhir-akhir ini ada banyak orang yang karena ada sebuah gagasan mengenai kebebasan, mereka memanfaatkan hal tersebut untuk dengan lantang membela kebebasannya meski terkadang ada hal yang tidak bisa diterima. Banyak orang yang salah mengartikan kata kebebasan, karena setiap orang memiliki kepentingannya sendiri-sendiri dan seringkali kepentingan-kepentingan tersebut saling bertubrukan sehingga harus ada satu yang merelakan dirinya untuk menunda sedikit kepentingannya agar kepentingan orang lain dapat lewat dari pada harus bertubrukan. Tindakan bebas seseorang seringkali berdampak menyakiti sesama sadar atau tanpa sadar.

Jean Paul Sartre adalah salah satu filsuf beraliran eksistensialisme yang menganggap bahwa eksistensi mendahului esensi. Dari hal itu manusia bukan secara kodrati ditentukan sejak sudah sedari lahir, namun manusia bebas untuk memaknai diri mereka sendiri. Dari sinilah Sartre menyuarakan mengenai eksistensinya adalah kebebasan

¹¹ Ibid.

itu sendiri, namun kebebasan menurut Sartre tidak begitu saja absolut melainkan tetap terbatas pada perasaan sadar dan tanggung jawab. Karena setiap tindakan yang dilakukan tidak secara sadar tidak bisa dianggap sebagai sebuah tindakan.¹²

Sempat diragukan pemikirannya oleh kebanyakan orang kristen karena pemikiran yang Sartre bawa cenderung akan menyulitkan untuk memberi kesalahan kepada orang karena kebebasan absolut yang dibawa oleh Sartre dalam eksistensialismenya. Mereka menyebutkan keraguan akan moral yang terkandung dalam pemikirannya dimana kebebasan absolut yang Sartre maksud ikut meniadakan ukuran-ukuran baik-buruknya perilaku manusia. Untuk menjawab hal tersebut Sartre membuat sebuah buku yang merupakan hasil dari kuliahnya di *Club of Maintenant* yang dibawakan secara padat untuk menjawab kritik dari orang-orang kristen terhadap filsafatnya.

Akan sangat menarik saya rasa untuk mengkaji karya dari Jean Paul Sartre yang satu ini mengenai konsep moralnya dengan tidak lupa melihat relevansinya dengan Pancasila. Menarik, selain alasan bahwa pemikiran yang hebat akan selalu memiliki rintangan tersendiri adalah bahwa dewasa ini orang-orang seakan menjadi mendambakan kebebasan namun salah mengartikan arti dari kebebasan itu yang kemudian menjadikannya berbuat hal yang tidak dapat dibenarkan atau amoral.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep moral dalam buku *Existentialism is a Humanism* ?
2. Bagaimana relevansinya dengan konsep moral pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan konsep moral dalam buku *Existentialism is a Humanism*
2. Mendiskripsikan relevansinya dengan konsep moral pancasila

D. Manfaat dan Kegunaan

¹² Sihol Farida Tambunan, "Kebebasan Individu Manusia Abad Dua Puluh: Filsafat Eksistensialisme Sarte," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 18, no. 2 (2016), h. 218.

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah dapat menambah wawasan terkait konsep moral dari Jean Paul Sartre serta bagaimana relevansinya dengan Pancasila. Juga menjadi wawasan bagaimana berperilaku sebagai manusia bermoral dikarenakan moral adalah ciri dari seorang manusia yang dapat berpikir dengan sehat. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademik

- a. Diharapkan dapat menambah khasanah mengenai pemikiran Jean Paul Sartre dalam salah satu pemikirannya tentang konsep moral.
- b. Diharapkan menjadi wawasan bahwa pentingnya mengetahui konsep moral itu seperti apa.
- c. Diharapkan menjadi wawasan bahwa konsepsi moral yang dibawa Jean Paul Sartre memiliki suatu relevansi dengan konsep Pancasila.

2. Manfaat pragmatis

- a. Menambah wawasan mengenai perlunya beretika sesuai dengan konsep moral yang berlaku di wilayah tersebut.
- b. Menambah wawasan mengenai moralitas yang dapat diterapkan di zaman sekarang.

3. Manfaat praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pemikiran Filsafat mengenai pemikiran Jean Paul Sartre tentang moral.
- b. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya baik dalam konteks yang sama mengenai moral maupun konteks yang lain.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai moralitas yang dibawa oleh Jean Paul Sartre sebagai topik utamanya adalah moral sebelumnya telah diteliti oleh Dwi Siswanto dalam artikelnya yang berjudul “*Kesadaran dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Humanisme Jean Paul Sartre*”, dalam penelitian ini beliau bertujuan untuk mengungkap dasar humanisme Jean Paul Sartre dalam konsep kesadaran dan tanggung jawab, kemudian menganalisis konsep tersebut dengan relevansinya dengan Pancasila. Dasar humanisme dalam penelitian ini dibagi menjadi kebebasan, kesadaran, dan tanggung jawab, dimana manusia sendiri tidak akan dianggap memiliki otentitas kehidupan jika dia tidak memiliki kebebasan absolut. Karena hal inilah Sartre lebih memilih untuk menolak Tuhan dan untuk bebas secara absolut manusia sendiri haruslah terlebih dahulu sadar dan bertanggung jawab akan kebebasannya. Ketika pemikiran tersebut dianalisis relevansinya dengan Pancasila terdapat beberapa poin yang berlawanan sehingga kita harus lebih bijak memilih mana yang baik dan sesuai dengan nilai moral Pancasila serta menolak bagian-bagian yang bertolak belakang.¹³

Artikel jurnal yang ditulis oleh Sihol Farida Tambunan yang berjudul “*Kebebasan Individu Manusia Abad Dua Puluh : Filsafat Eksistensialisme Sartre*”, dalam penelitian ini beliau menerangkan bahwa kebebasan kita sebagai individu menurut Sartre itu sangat penting karena kebahagiaan adalah hal yang hanya bisa ditemukan atau diciptakan oleh individu tersebut. Ketika k

ita tidak memiliki kesadaran untuk bebas, maka kita hanya akan terus menjadi budak bagi orang lain. Berkat pemikiran ini manusia modern menjadi lebih ingin memperlihatkan eksistensinya ke dunia dan semakin ingin dihargai sebagai subjek yang unik. Namun hal tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia karena yang pertama Sartre

¹³ Dwi Siswanto, “Kesadaran Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Humanisme Jean-Paul Sartre,” *Jurnal Filsafat* (1997), h. 25–32.

tidak menyertakan Tuhan dalam kebebasannya yang mana hal tersebut berlawanan dengan sila pertama yaitu “ketuhanan yang Maha Esa”.¹⁴

Diana Mella Yussafina dalam skripsinya yang berjudul “*Eksistensialisme Jean Paul Sartre dan Relevansinya dengan Moral Manusia*”, dalam skripsinya beliau menjelaskan bagaimana jika eksistensialisme Sartre diterapkan dalam moralitas manusia dimana seperti yang diketahui bahwa kebebasan individu, relasi antar manusia, kesadaran, dan tanggung jawab yang mendasari eksistensialisme Sartre berasal dari kemuakannya, kemudian di akhir kesimpulan beliau mengatakan bahwa eksistensialisme milik Sartre hanya akan menimbulkan kerusakan iman dan moralitas umat Muslim. Dikarenakan pemikiran yang Sartre miliki bisa digolongkan dalam kelompok eksistensialisme atheis dimana Sartre beranggapan bahwa kebebasan manusia itu adalah mutlak bebas dengan tidak adanya andil Tuhan dalam tindakan manusia.¹⁵

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muzairi dalam artikel jurnalnya yang berjudul “*Kebebasan Manusia dan Konflik Dalam Pandangan Eksistensialisme Jean Paul Sartre*”, beliau memaparkan bagaimana Sartre beranggapan tentang kebebasan manusia serta bagaimana konflik bisa terjadi menurut pandangan Sartre, kemudian beliau menerangkan kerancuan terhadap pemikiran Sartre dimana jika rasa bertanggung jawab atas diri dan orang lain adalah bagian dari kesadaran akan kebebasan, maka seharusnya Sartre tidak perlu mengatakan bahwa kehadiran orang lain adalah neraka. Dimana dengan kehadiran pemikiran tersebut dirasa tidak sesuai karena ketika kehadiran orang lain dirasa seperti neraka kenapa Sartre dipemikrannya mengharuskan dalam kebebasan untuk turut bertanggung jawab atas orang lain juga.¹⁶

¹⁴ Tambunan, “Kebebasan Individu Manusia Abad Dua Puluh: Filsafat Eksistensialisme Sartre .”, h. 215-232.

¹⁵ Diana Mella Yussafina, “Eksistensialisme Jean Paul Sartre Dan Relevansinya Dengan Moral Manusia” (UIN Walisongo, 2015), h. 1-185.

¹⁶ Muzairi, “Kebebasan Manusia dan Konflik dalam pandangan eksistensialime jean paul sartre,” *ESENSIA* 13, no. 1 (2012), h. 39–66.

Penelitian yang berjudul "*Kebebasan Manusia Dalam Filsafat Eksistensialisme (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Iqbal dan Jean Paul Sartre)*", yang dilakukan oleh Elvira Purnamasari menghadirkan dua pemikiran yang memiliki konsep kebebasan yang hampir sama meskipun terpisah oleh dasar eksistensialisme mereka. Iqbal dengan eksistensialisme *theistik* sedangkan Sartre dengan eksistensialisme *atheis*-nya. Pemikiran yang dimiliki Sartre dan Iqbal pada awalnya memiliki banyak kesamaan pada pembahasan kebebasan individualnya namun mulai memiliki perbedaan yang mencolok ketika menyentuh konsep kebebasan, kebebasan orang lain dan nilai humanisme dari eksistensialisme mereka. Dimana pada kebebasan orang lain menurut Sartre adalah ancaman bagi kebebasannya, sedangkan untuk konsep kebebasan dan nilai humanisme mereka berbeda karena yang Iqbal menempatkan Tuhan sebagai puncak, sedangkan Sartre menampik kehadiran Tuhan dalam pemikirannya.¹⁷

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Sihol Farida Tambunan dan Diana Mella Yussafina yang dengan tegas menolak pemikiran Sartre yang menolak kehadiran Tuhan dalam kebebasannya dan hal tersebutlah yang menjadi landasan ketidaksetujuan dua peneliti diatas. Dibandingkan dengan penelitian yang akan saya lakukan akan lebih tidak mempermasalahkan pendapat Sartre tentang Tuhan, memang dalam hal ini tidak bisa dimaafkan dikarenakan pascakeTuhanan Yang Maha Esa adalah sesuatu yang fundamental, tapi pasti ada sisi positifnya dan akan saya mengambil dan masuk lebih dalam lagi mengenai bagaimana seharusnya manusia berbuat dengan kesadaran dan tanggung jawab yang dimilikinya berikut dengan relevansinya dengan Pancasila.

Begitu juga dengan Muzairi dan Elvira Purnamasari, penelitian yang akan saya lakukan benar-benar berbeda dengan mereka. Muzairi dengan penelitiannya melakukan

¹⁷ Elvira Purnamasari, "Kebebasan Manusia Dalam Filsafat Eksistensialisme (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Jean Paul Sartre)," *Manthiq* 2, no. 2 (2017), h. 119–133.

kritik secara murni terhadap pemikiran Sartre yang dia anggap bahwa ada ketidakkonsistenan di dalamnya. Dan Elvira Purnamasari yang dalam penelitiannya menggunakan metode studi komparasi akan sangat berbeda dengan penelitian saya

Kemungkinan akan memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Siswanto. Karena pada akhir penelitiannya juga menganalisa relevansi yang dimiliki oleh pemikiran Sartre dengan Pancasila, hanya saja yang akan menjadi pembeda dengan penelitian tersebut terletak kepada kehadiran beberapa tokoh serta teori mereka mengenai moral juga karena fokus utama penelitian ini adalah salah satu buku karya Jean Paul Sartre maka fokus akan diberatkan untuk menganalisa buku tersebut, meski dalam prakteknya tidak dipungkiri akan menghadirkan beberapa buku-buku Sartre terdahulu.

F. Kerangka Teori

Moral merupakan landasan perbuatan sifat manusia yang sifatnya tergantung tempat, waktu, dan keadaan. Sehingga dapat dimengerti bahwasannya ketika kita berada di tempat yang berbeda bisa jadi moralitas yang ada di tempat itu bisa jadi berbeda dengan yang kita sudah terbiasa dengan moralitas warga masyarakatnya seperti rumah misal.¹⁸ Atau lebih mudahnya bisa dimengerti sebagai berikut bahwa moral adalah merupakan pedoman perilaku manusia dimana hal baik dan buruk dibedakan disana.¹⁹

Rene Descartes berpendapat bukan hanya baik dan buruk berdasarkan atas kesetiaan dengan rasio manusia, tapi juga rasio tunduk pada kehendak bebas Tuhan.²⁰

Pada pemikiran Frederich Nietzsche awal mulanya apayang bersifat baik dan buruk, yang ada hanyalah yang kuat dan lemah. Yang kuat dengan kekuatannya, dengan

¹⁸ Syaparuddin dan Elihami, "Peranan Pendidikan Nonformal dan Sarana Pendidikan Moral.", h.177.

¹⁹ Budiarto, "Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral dan Karakter.", h.51.

²⁰ Dewantara, *Filsafat Moral : Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, h.50.

kemampuannya menghina dan menindas yang lemah. Dikarenakan kaum lemah menang jumlah dan terkena pengaruh agama Katolik, kaum lemah menang. Menurutnya ini adalah suatu bencana sehingga menjadi tugas masyarakat untuk menciptakan *Uebersch* yang akan mengembalikan sifat kejantanan dan mengembalikan moralitas.

Herbert Spencer mencari jejak awal gagasan moral pada binatang, sebagai manusia yang berkembang dari hewan menurutnya, demikian juga gagasan-gagasan mengenai moral ikut berkembang seiring dengan waktu. cara berbuat yang dianggap berguna dan menyenangkan berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan dan dengan semakin majunya peradaban semakin disaringlah kebiasaan-kebiasaan itu sehingga menjadi sistem moral yang kita miliki sekarang. Hampir sama menurut August Comte etika adalah sebagai bagian Sosiologi, yang dianggap sebagai ilmu tertinggi. Kebiasaan yang berkaitan dengan moral itu muncul dari kebiasaan sosial yang berubah bersama perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam masyarakat.²¹

Thomas Hobbes dan Jean Jacques Rousseau berpendapat bahwa sebelum manusia mengorganisasikan dirinya ke dalam masyarakat politik, tidak terdapat baik dan buruk. Negara sendiri bukanlah tercipta begitu saja, melainkan hasil dari kesepakatan umum masyarakat yang dengan itu manusia mengorbankan beberapa haknya untuk menyelamatkan hak-hak lain yang ada di dalam dirinya. Ketika masyarakat sipil sudah terbentuk, masyarakat membuat keputusan berupa perintah dan larangan yang bersangkutan dengan perbuatan tertentu demi tercapainya *common good*.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau *Library Research* berikut dengan sifat penelitiannya berupa deskriptif kualitatif. Penelitian

²¹ Poespoprodjo, *Filsafat Moral : Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*. h. 105

²² *Ibid.* h. 108

pustaka mempunyai dua sumber data yang akan menjadi rujukan kajian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang berlaku sebagai bahan utama kajian didapat dalam buku *Existensialism is Humanism* karya Jean Paul Sartre. Sedangkan data sekunder sebagai pendukung atau memperkuat data primer didapatkan dari beberapa literasi yang masih memiliki keterkaitan dengan objek material dan objek formal.

Penelitian ini juga bisa dikategorikan sebagai jenis penelitian historis-faktual yang membahas pemikiran Jean Paul Sartre mengenai konsep moral dalam bukunya *Existentialism is a Humanism*. Penelitian ini juga berkenaan dengan biografi Jean Paul Sartre, dengan begitu peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai latar belakang dari munculnya pemikiran Jean Paul Sartre.

2. Sumber Penelitian

Ada beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer berasal dari buku karya Jean Paul Sartre sebagai bahan utama penelitian yaitu *Existentialism is Humanism* yang kemudian akan dikaji konsep moral yang ada di dalamnya.

b. Data Sekunder

Data ini bersumber dari buku terjemahan dan hasil penelitian lain yang masih memiliki keterkaitan dengan persoalan penelitian dan sumber-sumber tertulis lainnya. Salah satu sumber buku terjemahan yaitu buku Eksistensialisme dan Humanisme .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik literatur primer dan literatur sekunder yang terkait dengan objek yang diteliti. Peneliti akan meakukan upaya pengumpulan beberapa data yang memiliki keterkaitan dengan konsep moral dari Jean Paul Sartre dalam bukunya juga menyertakan berbagai literatur pendukung berupa buku, jurnal, artikel, majalah dan data-data lainnya.

Langkah selanjutnya adalah peneliti memilah satu-persatu mengenai mana yang memiliki keterkaitan dengan fokus utama yang menurut peneliti harus di utamakan. Setelah memilah data yang memiliki lebih banyak fokus terhadap objek penelitian, data-data yang memiliki lebih sedikit keterkaitannya dengan objek penelitian akan tetap digunakan sebagai penyokong pembahasan untuk lebih memperluas aspek bahasan dalam penelitian. Singkatnya peneliti akan menjadi lebih mudah fokus terhadap masalah utama dari bahasan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode historis guna mendeskripsikan pemikiran, karya tokoh ataupun filosof.²³ Metode analisis adalah sebuah jalur atau jalan yang dipakai untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan mengadakan perincian terhadap objek penelitian, atau cara untuk menangani suatu masalah dari objek yang diteliti tertentu dengan membandingkan satu pengertian dengan pengertian yang lain yang diharapkan dapat memberi kejelasan mengenai beberapa hal.²⁴

Analisis bukan hanya mengenai analisa umum, melainkan analisis yang fokus kepada wilayah-wilayah tertentu guna menggambarkan berbagai hal yang menjadi fokus penelitian. Dengan begitu dalam prosesnya peneliti dalam menganalisa data-

²³ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010).

²⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 1996).

data disesuaikan dengan pendekatan bernuansa filosofis sebagai landasan metodologisnya. Dan metode-metode yang peneliti pakai adalah sebagai berikut :

a. Metode deskripsi

Umumnya metode ini bersifat memaparkan hasil penelitian dan variabelnya seperti saat seseorang menyajikan makanannya di meja makan. Mudah-mudahan, penyajian tersebut peneliti menyajikan informasi yang lengkap mengenai atau pembahasan yang dari tema yang diteliti. Pemilihan terhadap metode ini pada umumnya menjelaskan beberapa kondisi sosial tertentu, tujuannya adalah untuk mempertegas situasi atau kondisi tertentu yang merupakan bagian dari pembahasan.²⁵ Dalam kasus ini peneliti menggunakan metode ini untuk memberikan gambaran yang jelas dalam meneliti konsep moral dari Jean Paul Sartre.

b. Metode kesinambungan historis

Dalam metode ini peneliti melihat benang merah perkembangan pemikiran suatu tokoh yang bersangkutan, baik yang berhubungan dengan lingkungannya maupun hal-hal yang mempengaruhi sepanjang perjalanan hidupnya. Disamping itu peneliti juga dapat menerjemahkan atau menarik pemahaman tokoh pada saat itu kemudian dikemas dan dijelaskan dengan konteks kekinian.²⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan hal sama dengan Jean Paul Sartre mengenai latar belakang pemikirannya yang dipengaruhi oleh perjalanan hidupnya.

c. Metode interpretasi

Interpretasi memiliki arti menafsirkan atau membuat tafsiran mengenai sesuatu yang memerlukan atau perlu untuk ditafsirkan. Menafsirkan berarti membuka suatu pemahaman atas sesuatu. Mudah-mudahan adalah ketika seseorang

²⁵ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah," *Junral Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021), h. 249–266.

²⁶ Siti Nurlaili et al., *Buku panduan skripsi* (Sukoharjo: FUD Press, 2016), h. 28.

menafsirkan suatu naskah tertentu maka pemahaman atas suatu naskah tersebut terbuka sehingga pengertian tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh lebih banyak orang yang membaca tafsiran dari suatu naskah tersebut. Demikian dalam menginterpretasi tidak bisa asal menafsirkan, karena hal tersebut harus bertumpu pada *evidensi objektif* yang kemudian mencapai kebenaran otentik.²⁷ Dalam hal ini metode interpretasi digunakan untuk menyelami konsep moral dari Jean Paul Sartre.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai pokok eksistensialisme dari Jean Paul Sartre.

Bab ketiga berisi mengenai diskursus moral yang didalamnya terdapat pengertian moral, teori-teori moralitas, etika, dan moral Pancasila.

Bab keempat berisi mengenai moral dalam pemikiran Jean Paul Sartre kemudian melihat relevansinya dengan Pancasila

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada dan saran berisi tentang pendapat inti dari keseluruhan penelitian yang dapat dipertimbangkan.

²⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*.

BAB II

POKOK EKSTENSIALISME JEAN PAUL SARTRE

A. Siapa Jean Paul Sartre ?

Jean Paul Sartre merupakan seorang berkebangsaan Perancis yang lahir pada 1905. Jean Paul Sartre memiliki seorang ayah dengan pangkat Letnan Dua di angkatan laut Perancis yang sempat menderita penyakit usus saat bertugas di Indocina yang kemudian meninggal dunia saat Jean Paul Sartre saat berusia 1 tahun lebih 3 bulan. Jean Paul Sartre juga mempunyai seorang ibu bernama Anne-Marie yang digambarkan dalam merupakan anak bungsu juga merupakan anak satu-satunya perempuan yang terpaksa kembali ke rumah orang tuanya Charless Schweithzer dan Louise Schweithzer karena tidak punya uang.¹

Jean Paul Sartre di usia kecilnya dituliskan olehnya dalam sebuah buku *Les mots* (kata-kata) yang merupakan salah satu karya puncaknya, bahwa dirinya dikontrol penuh oleh kakeknya yang bernama Charless Schweithzer. Dalam buku tersebut Sartre menjelaskan bahwa masa kecilnya merupakan periode-periode kegelapan dalam hidupnya.²

Kakek dari Jean Paul Sartre mendidik Sartre yang masih berusia anak-anak dengan kontrol yang sangat kuat. Kakeknya yang bernama Charless Schweitzer adalah seorang guru sekaligus penulis buku pelajaran bahasa jerman yang dipakai di seluruh sekolah tingkat menengah di perancis saat itu. Untuk kakek Jean Paul Sartre di usianya sudah seharusnya menginjak usia pensiun, tapi demi menghidupi putri serta cucunya beliau lanjut megajar. Jean Paul Sartre menggambarkan keadaan itu seperti ibunya Anne Marie menjadi seorang pembantu di rumahnya sendiri tanpa upah. Anne Marie juga digambarkan oleh Sartre diperlakukan kembali seperti anak-anak yang harus mengikuti perintah dari orang tuanya.

Anne Marie diperbolehkan meminta uang kepada orang tuanya, hana saja mereka lupa memberikannya. Bahkan teman-temannya yang sudah menikah, ketika ingin mengundang Anne Marie untuk makan malam. Anne Marie harus meminta Izin terlebih dahulu dan berjanji

¹ Lavine, *From Socrates To Satre*, h.403.

² K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II Prancis*, 5 ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 81.

untuk pulang sebelum pukul sepuluh sehingga undangan untuk Anne Marie ibunya Sartre menjadi semakin jarang.

Seperti anak sebayanya, Jean Paul Sartre berjanji untuk menikahi ibunya dan menjauhkan ibunya dari kehidupan yang begitu keras dan tekanan dari kakek dan neneknya. Tapi yang paling perlu diperhatikan bahwa di usia Sartre yang masih kecil dia memiliki pemikiran bahwa perilaku yang dilakukan kakek dan neneknya adalah suatu eksploitasi persis seperti yang dilakukan oleh kaum borjuis dan hipokrit.³

Autobiografi Sartre secara khusus terdengar keji dalam mengungkapkan kepura-puraan borjuis dan sikap hipokrit Charles Schweitzer. Dia adalah seorang pria bersosok tinggi, bercambang, dan tampan, yang oleh Sartre digambarkan sebagai "sangat mirip dengan Tuhan Bapa sehingga dia diambil untuknya." Namun, meskipun dia memerintah rumah tangga tersebut dengan memerankan peran patriark yang tegas dan mirip Tuhan, Charles Schweitzer benar-benar menyayangi cucunya dan menjaganya tetap di rumah sampai berusia puluh tahun, memberinya pendidikan sendiri dari pada mendaftarkannya ke sekolah umum yang berstandar lemah.

Sartre mengungkapkan kemunafikan kaum borjuis yang terletak dalam kakek juga neneknya yang sangat bangga dengan anak kecil jenius yang berasal dari keturunannya yang memiliki kelayakan untuk mendapatkan pendidikan yang paling ideal. Kebanggaan tersebut menghadirkan ketenangan dan mengusir ketakutannya dengan kematian sendiri.

Alasan egois yang disembunyikan dibalik konsep idealisme borjuis tentang pengajaran dan pendidikan yang ideal, sehingga mengakibatkan Jean Paul Sartre menghabiskan waktu di dalam rumah selama lima tahun mengabaikan usia ideal untuk masuk sekolah, bergaul dengan anak-anak sebaya dilingkungannya dibatasi, dan merasakan menjadi tahanan di rumahnya sendiri. Jean Paul Sartre tinggal di sebuah apartemen lantai enam Rue le Goff di Latin Quarter Paris, disana Sartre di asingkan dari dunia luar bahkan perkembangan

³ Lavine, *From Socrates To Sartre*.h.404

fisiknya pun tidak diperhatikan oleh kakek dan neneknya. Ketidakpedulian tersebut bahkan sampai pada titik sakit yang diderita pada mata kanan Sartre tidak mendapatkan penanganan medis yang menyebabkan matanya bermata juling sekaligus mengurangi penglihatannya secara perlahan. Jadi jelas bahwa dimaksud Sartre sebagai idealisme borjuis yang egois.

Dibalik semua itu ada satu sisi positif yang Sartre dapat dari kehidupan sehari-hari terkurung di dalam rumahnya dengan pendidikan yang dipaksakan oleh kakeknya. Diantaranya adalah Sartre dikelilingi oleh buku-buku studi milik kakeknya, buku-buku yang dipinjam neneknya dari perpustakaan, buku-buku milik ibunya yang sering dipakai membacakan cerita untuk kepada Sarre. Dia merasa sangat senang berada di sekitar buku-buku itu bahkan tidak keberatan bahwa akhir hidupnya dikelilingi oleh buku-buku. Menurutnya buku-buku adalah dunia yang dia rindukan dan kuasai, hal tersebut sangat jarang bahkan dikalangan anak kecil seusianya sangat menyukai buku-buku. Sampai pada usia tiga tahun Jean Paul Sartre sangat senang sampai dia mengajari dirinya sendiri untuk bisa membaca dan menjawab banyak sanjungan-sanjungan dari kakeknya. Sartre berhasil memerankan cucu jenius yang membanggakan di depan kakeknya dan memulai debut pertamanya dengan cepat dengan membuat buku orisinalnya sendiri.⁴

Kakeknya, Charless Schweitzer seorang yang menentukan pekerjaan masa depan Sartre. Seperti sudah menjadi hal lumrah untuk seorang anak kecil mempunyai keinginan menjadi seorang penulis. Charless Schweitzer tidak mencoba menghentikan keinginan Sartre untuk menjadi seorang penulis, bahwa menjadi seorang penulis tidak bisa mencukupi seluruh biaya hidupnya ketika dewasa. Justru menjadi seorang penulis menurut Charless pada usia Jean Paul Sartre pada saat itu dan kepercayaannya terhadap Sartre yang jenius membuatnya mendukung Sartre untuk menjadi seorang penulis. Sehingga untuk sementara waktu semasa

⁴ Ibid.

hidupnya Sarte tetap menjalani kehidupannya dengan menjadi seorang penulis dan masih percaya dengan kerancuan bahwa sastra dapat menyelamatkan dirinya.⁵

Karena pada awalnya Sartre memang beranggapan dan percaya dengan mengambil keputusan untuk menjadi seorang pengarang besar yang menurutnya akan menyelamatkan dia. Tapi berkat keacuhan yang diberikan oleh kakeknya yang hanya memiliki kekaguman terhadap cucu jeniusnya tersebut, sehingga Sartre membutuhkan waktu yang begitu lama untuk menyadari bahwa hal yang dia percayai adalah sebuah kekeliruan.⁶

Charless Schweitzer menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap pilihan karir atau pekerjaan Sartre yaitu cita-citanya menjadi seorang penulis. Sartre lebih lanjut mengutuk kata-kata manis yang dikatakan oleh kakeknya sebagai bentuk egoisme borjuis yang sejak awal Sarte sudah sadari bahwa niat dan kata-kata yang keluar dari kakeknya hanyalah sebuah kedok atau kepalsu-palsuan. Sartre juga mengutuk pendapat kakeknya bahwa menjadi seorang penulis dan menulis dapat menjadi penyelamatnya atau seseorang yang menekuni pekerjaan seorang penulis. Setelah Sartre mengetahui bahwa karir kepenulisan tidak bisa menyelamatkannya, Sartre benar-benar telah menghancurkan doktrin yang sempat dipaksakan oleh kakeknya. Sarte menganggap bahwa sastra tidak memiliki apapun untuk dibanggakan karena hal tersebut merupakan sebuah kepalsuan yang dipaksakan kepadanya. Karir kepenulisannya adalah sebuah hal yang palsu dan kepura-puraan seorang borjuis.

Kepatuhan sampai ke tulang-tulangku dan sangat menipu, aku dengan sangur senang menulis mengenai kesedihanku. Selama sepuluh tahun terakhir, Sartre menulis, "Aku telah menjadi orang yang terjaga, tersembuhkan dari kegelapan manis pahit yang begitu lama." Dia telah tersadar bahwa dia memiliki peran yang secara politis terkait dengan pemikiran Marsis dan tindakan kolek Namun, kepura-puraan palsu yang sudah begitu lama ada telah menelan

⁵ Ibid. h.406.

⁶ Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II Prancis*, h.83.

jalannya menuju kepribadiannya, dan dia sadar kalau dia tak akan pernah disembuhkan oleh dirinya. "Aku masih menulis," katanya. "Apa yang bisa kulakukan?"⁷

Pendidikan Sartre selanjutnya ada di beberapa sekolah terbaik di Prancis, berakhir di Ecole Normale Supérieure, sebuah tempat pendidikan pascasarjana untuk pelatihan profesor perguruan tinggi atau universitas, sebuah sekolah pascasarjana yang paling eksklusif dan unggul di seluruh Prancis. Setelah wisuda Sartre, ada ujian bagi para dosen filsafat, yang pertama kali gagal dicoba oleh Sartre. Namun, untuk yang kedua kalinya mengikuti ujian itu, Sartre menjadi yang terbaik, urutan kedua adalah Simone de Beauvoir. Mereka bertemu sebentar sebelum ujian dilaksanakan pada musim semi 1929 dan menjadi kekasih sekaligus sahabat, rekan dalam filsafat dan politik. Namun mereka tidak sampai menikah sampai akhir hayat, kata Simone de Beauvoir bahwa hal tersebut dianggap sebagai lembaga borjuis.⁸ Simone de Beauvoir adalah seorang kontributor penting bagi pemikiran eksistensialisme dan politik Prancis-melalui cerita pendek dan novel diantaranya studi penting mengenai perempuan (*The Second Sex*) dan mengenai penuaan (*The Coming of Age*); dan berbagai esai filsafat. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui mengenai perkembangan pemikiran Sartre muncul dari autobiografi Simone de Beauvoir sendiri, yang terdiri atas empat volume.⁹

Keduanya mulai mengajar filsafat di perguruan tinggi, Sartre sendiri berturut-turut di kota pelabuhan utara Le Havre, Laon, dan Paris, sedangkan de Beauvoir di kota pelabuhan Mediterania Marseille. Pada waktu itu ia berkenalan dengan pemikiran fenomenologi milik Husserl Pada 1933 dan 1934, Sartre mendapat kesempatan untuk memperdalam aliran filsafat fenomenologi milik Husserl ini di *French Institute* di Berlin.¹⁰ Saat itu Hitler beberapa bulan kemudian menjadi kanselir Jerman. Baik Sartre maupun de Beauvoir pada saat itu tidak memiliki pengetahuan politik, juga tidak tertarik mempelajarinya. Keduanya benar-benar

⁷ Lavine, *From Socrates To Sartre*. h.407

⁸ Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II Prancis*. h.84

⁹ Lavine, *From Socrates To Sartre*. h. 407

¹⁰ Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II Prancis*. h. 84

menentang keseluruhan dunia borjuis, dan sudah mengabdikan diri untuk menghancurkannya, tetapi untuk ini mereka bermaksud mencapainya melalui sastra bukan politik.

Pada tahun pendirian totalitarianisme Nazi di Jerman, Sartre hidup sebagai seorang awam politik di Berlin dan menetapkan ikatan filosofisnya pada arus eksistensialisme dan fenomenologis filsafat. Filsafat modern Jerman ini bergabung dengan tradisi filsafat zaman dulu sebagai sumber imajinasi kokoh dan cerdas dalam karya Jean Paul Sartre.¹¹

B. Pokok eksistensialisme Jean Paul Sartre

Eksistensialisme yang dibawa oleh Sartre tidak bisa dianggap muncul begitu saja ke permukaan pikiran salah satu pelopor aliran eksistensialisme di Perancis itu. Sama seperti filsuf lainnya, Sartre turut dipengaruhi pikirannya oleh filsuf terdahulu.

Perlu diketahui kehidupan Sartre turut mempengaruhi setiap sisi pemikirannya. Seperti apa yang Sartre sempat munculkan di karya pertamanya yang berjudul *Nausea* (muak) yang merupakan ungkapan kekesalan Sartre terhadap kemunafikan dan kesesakan dengan apa yang terjadi di sekitarnya mengenai manusia dan berbagai hal yang mengikat mereka. Karya tersebut merupakan debut pertama filsafat eksistensialisme Sartre dalam bentuk novel dan mendapatkan banyak apresiasi.

Filsafat menurutnya, berawal dari *cogito* atau kesadaran itu sendiri, mengenai kesadaran akan dirinya sendiri. Sartre setuju dengan Descartes, tapi sangat disayangkan menurut Sartre, konsep miik Descartes adalah *cogito* yang tertutup. Untuk menutupi hal tersebut Sartre menghadirkan pandangan Husserl yang memiliki pernyataan bahwa intensionalisme merupakan ciri dari kesadaran. Menurut hakikatnya kesadaran terarah kepada orang lain melalui dirinya. Kesadaran juga secara hakikat merupakan transedensi, berbeda dengan Descartes yang menggambarkan kesadaran sebagai imanensi.

¹¹ Lavine, *From Socrates To Sartre*.

Menurut Sartre, pandangan fenomenologi Husserl tidak begitu memberikan penjelasan yang memuaskan tentang adanya fenomena-fenomena. Hal yang menurut Sartre terasa janggal adalah mengenai “apakah adanya fenomena-fenomena, bisa disebut sebagai fenomena?”, bagi Husserl apa yang ada itu tidak berbeda secara prinsip dengan dengan tampaknya objek itu.

Sartre meyakini bahwa “ada” merupakan syarat bagi tampaknya sesuatu, karena ada itu selalu bersifat transfenomenal. Jika orang tidak mau menerima ini maka mau tidak mau mereka terjatuh pada idealisme, karena telah menyerahkan “ada” pada subjek. Pandangan tersebut berasal dari salah satu filsuf yaitu George Berkeley, *Esse est Principi* (ada itu karena dipersepsi). Jadi dalam menentukan hubungan antara kesadaran dengan “ada”, tidak mungkin bahwa “ada” itu hanya fenomena saja, tidak mungkin melampaui polaritas antara “kesadaran” dan “ada”.¹²

Atas dasar itu, Sartre kemudian mempertanyakan tentang “ada”nya kesadaran. Sudah diketahui bahwa kesadaran itu bersifat intensional, hal tersebut dirumuskan oleh Sartre dengan kesadaran akan dirinya berada pada kesadaran akan sesuatu. Kesadaran adalah kesadaran akan diri, tetapi kesadaran akan dirinya tidak sama dengan pengalaman tentang dirinya (meletakkan diri sebagai pengenalan). Karena *cogito* bukannya pengenalan diri, melainkan kehadiran akan dirinya secara non-tematis maka harus dibedakan antara non-tematis dan tematis (kesadaran akan sesuatu dan kesadaran akan dirinya). Itu berarti *cogito* yang menjadi asal dari filsafat Sartre adalah *cogito* pra-reflektif. Kesadaran akan dirinya membonceng pada kesadaran akan dunia. Hal itu berarti juga bahwa *cogito* tidak menunjuk pada suatu relasi pengenalan, melainkan pada suatu relasi “ada”. Kesadaran adalah “ada” pada dirinya, kehadiran pada dirinya merupakan syarat yang perlu dan cukup untuk kesadaran.¹³

¹² Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II Prancis*, h.91.

¹³ Ahmad Syukri, “Tema Sentral Dalam Pemikiran Jean Paul Sartre,” *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 22, no. 1 (2019), h.47.

Secara singkat bisa dikatakan bahwa kesadaran yang Sartre bawa berbeda dengan Descartes, meskipun konsep kesadaran itu sendiri berasal atau terinspirasi dari Descartes. Menurut Sartre *cogito* yang dibawakan oleh Descartes kurang dapat menjelaskan mengenai sesuatu yang ada. Sampai sempat membawa kembali pemikiran Husserl dan Berkeley untuk menyempurnakan pendapatnya mengenai sesuatu yang ada.

Sartre bertemu dengan konklusi yang menurutnya memuaskan bahwa kesadaran mengenai “ada”nya sesuatu itu berada setelah sesuatu itu ada terlebih dahulu. Oleh karenanya bisa disebut dengan *cogito* pra-reflektif. Hingga pada saat ini terkenal dengan istilah eksistensi mendahului esensi.

C. Karya Jean Paul Sartre

Sartre semasa hidupnya dikenal sebagai seorang filsuf aliran eksistensialisme yang menyebarkan filsafatnya dalam bentuk karya sastra (novel). Sampai pada suatu keadaan mendapatkan penghargaan nobel kesusastraan, namun ditolak karena menurutnya jika penghargaan tersebut dia terima, maka kebebasannya akan terganggu sebagai seorang pengarang.¹⁴

Dari sekian banyak karya yang Sartre yang terkenal, ada tiga karya yang selalu menjadi hal yang tak terelakkan jika kita membicarakan Jean Paul Sartre yaitu buku *Being and Nothingness* yang bisa dikatakan buku awal pedoman mengenai pemikiran Jean Paul Sartre, *Nausea* yang merupakan novel pertama yang merupakan refleksi filsafat Sartre, dan *Existentialism is a Humanism* yang merupakan rangkuman singkat mengenai filsafat serta menjawab tuduhan-tuduhan dari kaum kristiani yang meragukan filsafatnya.

1. *Being and Nothingness*

Seperti yang telah dijelaskan buku ini adalah pedoman awal yang menerangkan tentang filsafat Sartre yang dijelaskan secara teoritis dan runtut. Namun cukup rumit untuk

¹⁴ Sunarso, “Mengenal Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre Serta Implementasinya Dalam Pendidikan,” *Informasi* 36, no. 1 (2010), h. 5.

dipahami mengingat Sartre cukup banyak memberikan diksi yang beragam untuk menjelaskan mengenai filsafatnya.

Dikatakan cukup sulit juga karena banyak tokoh yang Sartre hadirkan di dalamnya, karena banyak tokoh filsafat yang menjadi inspirasi dalam pemikirannya. Dari satu tokoh ke tokoh lain Sartre secara bergantian menjelaskan pemikiran tokoh itu yang kemudian Sartre lebur menjadi bagian dari pemikirannya dengan sedikit penyempurnaan dan kritik kritis mengenai suatu pemikiran. Buku ini sangat penting secara historis, karena mengandung mengenai bagaimana Sartre pada akhirnya sampai pada filsafatnya saat ini yang juga telah menyebar luas. Dan dianggap sebagai salah satu filsuf besar abad 20.

2. *Nausea*

Nausea merupakan novel pertama yang Sartre buat secara sadar bahwa dengan media karya sastra dalam bentuk novel, maka filsafatnya dapat mencapai banyak orang. Bisa dikatakan juga bahwa novel tersebut adalah bagian dari refleksi filsafat dari Sartre.

Novel ini menceritakan tentang keseharian seorang yang bernama Roquentin. Bercerita tentang Roquentin yang merasakan kekecewaan dan tidak bisa percaya terhadap orang lain. Kesepian itu diperparah dengan anggapannya yang tidak percaya Tuhan. Sartre memandang kehadiran yang lain selain dirinya. Dalam novel ini Sartre menggambarkan keberadaan orang lain dengan nama *The Autodidact* yang merupakan penghuni perpustakaan yang sering dia kunjungi untuk menghabiskan waktu dengan membaca.

Sartre menggambarkan *The Autodidact* sebagai orang-orang yang bodoh dan dipandang rendah oleh Roquentin. Menurut eksistensialisme, manusia memiliki kebebasan untuk menanggapi dunia yang acuh ini dengan cara apapun yang menurut mereka cocok.

3. *Existentialism is a Humanism*

Merupakan buku hasil dari perkuliahan Sartre di *Club of Maintenance*, yang merupakan jawaban dari banyak kritik yang diterima oleh Sartre dari beberapa orang yang tidak setuju dengan pemikirannya. Terlebih bagi kaum kristiani yang merasa terancam

dengan keberadaan pemikiran Sartre yang dianggap sebagai suatu ancaman karena ketidakpercayaan Sartre terhadap Tuhan.

Dalam buku ini Sartre menjawab banyak keraguan mengenai eksistensialismenya yang menggagas mengenai kebebasan manusia. Orang-orang menganggap bahwa kebebasan menurut Sartre terlalu bebas, sehingga dengan kebebasan itu orang-orang tidak dapat disalahkan karena kebebasannya. Bukan hanya bebas akan kendali atau tekanan orang lain dalam mengambil keputusan, melainkan juga Sartre menganggap bahwa bahkan jika Tuhan itu ada tidak akan melibatkan diri-Nya dalam setiap pengambilan keputusan manusia.

Kaum Kristiani percaya bahwa ada tanda-tanda dari Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan manusia, bagi Sartre bahwa jika setiap tanda-tanda itu ada, merupakan kebebasan manusia dalam memaknai tanda-tanda tersebut.

BAB III

DISKURSUS MORALITAS

A. Pengertian Moralitas

Asal kata moral berasal dari kata *more* (kata tunggal) dan *mores* (kata jamak) yang berarti adat atau kebiasaan. Moral bisa disebut sebagai moral dikarenakan dia menempel pada sesuatu. Sesuatu disini berarti manusia, setiap apa yang dilakukan oleh manusia akan memunculkan suatu kebiasaan-kebiasaan, kemudian menyebar dan tetap dilakukan dalam jaga waktu yang panjang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.

Moral lebih lengkap lagi didefinisikan sebagai suatu ajaran-ajaran atau wejangan-wejangan dan ketetapan baik itu lisan maupun tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan berperilaku atau bertindak agar dapat disebut sebagai manusia yang baik.¹ Moral mengenai sesuatu yang baik tidak akan pernah ada jika sebagian besar dalam suatu masyarakat tidak menyetujui akan hal tersebut atau hal tersebut sudah tidak relevan dengan zaman yang ada pada saat itu.

Moralitas adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh manusia juga sebagai penanda atau pembeda diri kita dengan hewan. Manusia memang ada kalanya memakai apa yang disebut sebagai insting secara umum. Namun yang membedakannya adalah kepemilikan akal yang tidak dimiliki oleh hewan. Jadi terdapat proses pembelajaran dari apa yang dilakukan sebelumnya, sehingga kesalahan atau kerugian akan sesuatu dapat dihindari dikemudian hari. Berbeda dengan hewan yang hanya mengandalkan insting lebih, cenderung banyak terjerumus kedalam kesalahan yang sama berulang kali. Hewan bukannya tidak belajar, hanya saja pembelajaran yang mereka proses lebih lama dari apa yang manusia lakukan.

Moralitas dapat terbagi menjadi dua yaitu objektif dan subjektif. Moralitas objektif adalah perbuatan yang tanpa andil apapun dari pelaku, semata-mata hanya sebuah perbuatan tanpa pengaruh modifikasi dari pelaku perbuatan. Sehingga perbuatan tersebut murni bukan

¹ Franz Magnis dan Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, 17 ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 14.

tas dasar apapun, seperti perasaan marah atau kasihan. Sedangkan moralitas subjektif adalah perbuatan yang dipengaruhi berbagai faktor yang ada dalam diri pelaku perbuatan. Mulai dari latar belakang kehidupan, pendidikan, dan hati nuraninya.²

Moralitas juga bisa berupa moralitas intrinsik dan ekstrinsik, berbeda dengan pembagian moralitas sebelumnya. Moralitas intrinsik merupakan pandangan atas perbuatan menurut hakikatnya bebas dari berbagai bentuk hukum positif. Perbuatan menurut hakikatnya baik atau buruk yang mempunyai arti bahwa dalam hal ini perbuatan-perbuatan itu tidak berdasarkan perintah atau larangan pihak lain, bisa dimisalkan pembunuhan atau pemerkosaan. Moralitas ekstrinsik merupakan pandangan atas perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh orang yang berkuasa atau hukum positif.³

Moralitas pada akhirnya bisa dikatakan berdasarkan beberapa pendapat di atas merupakan suatu ajaran mengenai budi pekerti luhur atau tolak ukur mengenai baik dan buruk yang prosesnya terdapat campur tangan manusia yang sudah melewati waktu yang sangat panjang sehingga sudah mengakar kuat dan diterapkan secara turun temurun.

B. Pengertian Etika dan Etiket

Secara asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat isitiadat/kebiasaan baik. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang biasanya berkaitan dengan perkataan moral yang merupakan berasal dari bahasa latin yaitu *mos* dan dalam bentuk jamaknya *mores*, yang berarti juga adat atau kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindarkan diri dari hal-hal buruk.⁴

Etika hakikatnya mengamati realitas secara kritis dan dalam kajian secara terminologi etika berarti sebuah cabang ilmu yang membicarakan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik atau buruk.⁵ Terdapat perbedaan antara moral dan etika. Moral lebih tertuju pada

² Poespoprodjo, *Filsafat Moral : Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, h.102.

³ Ibid, h.103.

⁴ Maidiantius Tanyid, "Etika Dalam Pendidikan : Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan," *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014), h.237.

⁵ Ibid, h.237.

penilaian tentang perilaku baik dan buruk, bisa juga berupa ajaran mengenai suatu tindakan baik dan buruk. Sedangkan etika adalah kajian kritis mengenai sistem nilai yang ada dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Jadi, moral ajaran sistem nilai mengenai baik dan buruk yang diterima begitu saja, sedangkan etika adalah suatu kajian kritis mengenai suatu sistem moral tertentu.⁶

Etika bisa dibilang sekaligus kurang dan lebih dari ajaran moral, dianggap kurang karena etika tidak memiliki wewenang atau kuasa untuk menetapkan mengenai sesuatu yang boleh dan tidak boleh. Sedangkan dianggap lebih karena etika berusaha mengerti alasan dibalik kewajiban kita menaati atau menurut norma-norma tertentu.⁷

Dalam catatan sejarah etika upaya filsafat lahir dari jatuhnya tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun yang lalu. Karena pada saat itu sistem nilai yang ada sudah tidak relevan, maka para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar manusia. Demikian dengan yang terjadi seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang mempersoalkan mengenai norma-norma yang ada sekarang ini apakah masih relevan atau tidak, mana yang wajib kita terapkan dalam tindakan kita dan mana yang tidak.⁸

Secara umum etika dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif menekankan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku, membicarakan masalah baik dan buruk tindakan manusia dalam suatu lingkup masyarakat tertentu.⁹ Karena itu etika deskriptif tidak menilai apapun kepada sistem nilai yang berlaku, jadi hanya berperan untuk menggambarkan atau memaparkan sehingga bersifat netral.

Etika normatif merupakan suatu kajian mengenai ajaran norma baik dan buruk sebagai suatu fakta, tidak perlu mengajukan alasan rasional terhadap itu, cukup merefleksikan

⁶ Sri Rahayu Wilujeng, "Filsafat , Etika Dan Ilmu : Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan," *Humanika* 17, no. 1 (2013), h.81.

⁷ *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, h.14.

⁸ *Ibid*,h.15.

⁹ Wilujeng, "Filsafat , Etika Dan Ilmu : Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan.," h.81.

mengapa hal itu merupakan suatu keharusan.¹⁰ Etika normatif mempersoalkan norma itu apakah benar atau tidak.

Etiket, sesuatu yang sering disandingkan bebarengan dengan adanya etika dan sering kali disalah artikan sebagai etika itu sendiri. Etiket sendiri berasal dari bahasa perancis *etiquette* yang berarti surat undangan yang awalnya biasa dipakai raja-raja Perancis ketika akan mengadakan pesta.¹¹ Namun seiring waktu istilah tersebut beralih makna menjadi tata krama dan sopan santun seperti tata cara makan, berpakaian, duduk, dan lain sebagainya, sampai pada titik menjadi tolak ukur seseorang yang beradab.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa etika dengan etiket memiliki perbedaan yang sangat jelas. Etika lebih condong kepada konsep moral, sedangkan etiket hanya perihal tata cara sopan santun dalam pergaulan dengan sesama manusia.

Sangat jelas bahwa etika bidangnya lebih luas, dalam artian mengkaji mengenai apakah hal ini bisa disebut sebagai baik atau buruk. Sedangkan Etiket hanya menyangkut tata perilaku sopan santun seorang individu dalam interaksinya dengan individu lain dalam suatu lingkup masyarakat tertentu.

C. Pengertian Norma

Norma dari segi bahasa berasal dari kata dalam bahasa Inggris *norm*. Dalam kamus Oxford *norm* berarti *usual or expected way of behaving* yaitu norma umum yang berisi tentang bagaimana cara berperilaku yang benar. Norma adalah suatu pedoman perilaku yang ada di kelompok tertentu, norma memungkinkan seseorang untuk terlebih dahulu menentukan mengenai bagaimana tindakannya akan dinilai oleh masyarakat, begitu juga norma bisa menjadi kriteria bagi orang lain untuk menolak dan mendukung tindakan seseorang.¹³

¹⁰ Ibid, h.82.

¹¹ Neni Yulianita, "Implementasi Etika Di Era Globalisasi," *Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 18, no. 4 (2002), h. 495.

¹² Sri Handayani, "Unggah-ungguh Dalam Etika Jawa" (UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 21.

¹³ Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum UNSRAT* 20, no. 3 (2012), h.2-3.

Norma juga bisa diartikan sebagai suatu standar, ukuran, dan aturan. Norma adalah sesuatu yang sudah pasti dapat digunakan sebagai pembandingan perihal sesuatu hal yang kita ragukan hakikatnya, besar, kecil, ukuran, dan kualitasnya. Norma moralitas merupakan aturan, standar, atau ukuran yang dapat dipakai oleh seseorang untuk mengukur kebaikan dan keburukan suatu perbuatan.¹⁴

Norma pada dasarnya adalah bagian dari kebudayaan, karena awal terciptanya sebuah peradaban atau budaya itu terjadi oleh interaksi antar manusia atau kelompok manusia tertentu yang pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang disebut norma.

Norma dapat juga diartikan sebagai nilai, karena norma adalah suatu konkretisasi dari nilai. Sehingga norma adalah perwujudan dari nilai, karena setiap norma terkandung nilai-nilai di dalamnya, nilai sekaligus menjadi sumber dari norma.¹⁵

Norma dapat berupa formal dan informal. Norma formal dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang ditulis sedemikian rupa yang isinya terdapat hukuman yang harus diberikan kepada seseorang yang melanggar norma yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan norma informal tidak memuat sanksi hukum secara spesifik, namun masyarakat seperti memiliki standar mengenai nilai, sampai pada titik tertentu menjadi sebuah karakteristik masyarakat tersebut.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian norma dapat disimpulkan bahwa norma merupakan pedoman mengenai apa yang baik dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dikarenakan disebut sebagai pedoman, norma bisa dikatakan sebagai tolak ukur yang sah dalam menghukum sesuatu itu boleh dilakukan atau tidak.

¹⁴ Poespoprodjo, *Filsafat Moral : Kesulitan Dalam Teori dan Praktek*, h.117.

¹⁵ Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional.", h.3.

¹⁶ Yutinus Suhardi Ruman, "Keteraturan Sosial, Norma, Dan Hukum : Sebuah Penjelasan Sosiologis," *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 2 (2009), h.110.

D. Teori Moralitas

Teori yang mengatakan bahwa semua bentuk moralitas itu ditentukan oleh konvensi, bahwa semua bentuk moralitas itu resultan atau akibat dari kehendak seseorang yang dengan egoismenya memerintahkan atau melarang perbuatan-perbuatan tertentu tanpa berdasarkan atas sesuatu yang disebut intrinsik dalam diri perbuatan manusia atau pada hakikat manusia yang dikenal sebagai aliran positivisme moral. Disebut begitu karena menurut aliran positivisme moral bahwa semua moral itu bertumpu pada hukum positif sebagai kebalikan atau lawan dari hukum kodrat. Menurut teori tersebut perbuatan dianggap benar berdasarkan kebiasaan manusia, hukum-hukum negara, dan pemilihan bebas Tuhan.

1. Teori kebiasaan manusia

Teori yang mengatakan bahwa moralitas itu berasal dari kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Ada pendapat hal ini bisa jadi rawan bahwa bisa jadi moralitas tersebut secara sengaja dipaksakan oleh orang-orang pandai atau berkuasa untuk menundukkan rakyat biasa. Oleh karena tekanan, pendapat umum dan tradisi, sehingga orang biasa menerima hukum moral tersebut secara paksa.

Menurut Friedrich Nietzsche awalnya moralitas mengenai baik dan buruk itu tidak ada, yang ada hanya kuat dan lemah. Yang kuat mengintimidasi yang lemah, sehingga muncullah sekat yang memisahkan kedua golongan ini. Muncullah moralitas budak dan moralitas bendoro, namun karena mendapat pengaruh agama katolik moral budak jadi menang.¹⁷

Salah satu filsuf yang mendukung pendapat ini adalah Herbert Spencer, sebagai seorang evolusionis modern, Spencer mengatakan bahwa sebagaimana manusia yang beranjak dari hewan kemudian menjadi makhluk berakal bernama manusia begitupun dengan konsep moral serta gagasan-gagasan yang melatar belakangi hal tersebut, kebiasaan-kebiasaan yang berguna kemudian menjadi suatu adat yang mengakar pada

¹⁷ Poespoprodjo, *Filsafat Moral : Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, h.104.

suku primitif sebagai bagian dari moralitas mereka. Oleh karena proses evolusi belum berhenti, maka sistem moral yang ada masih bisa berkembang menjajadi sistem moral yang lebih tinggi.¹⁸

Auguste Comte adalah pendiri aliran positivisme yang memandang etika sebagai bagian dari sosiologi, yang dianggap sebagai ilmu tertinggi. Kebiasaan moral itu muncul dari kebiasaan sosial dan terus berubah selaras dengan perbuatan-perbuatan dalam masyarakat.

2. Teori hukum-hukum negara

Teori yang beranggapan bahwa tidak ada moralitas yang berasal dari hakikat murni suatu perbuatan tersebut, namun moralitas tercipta/diberikan oleh negara dan filsuf yang memiliki pemikiran ini adalah Thomas Hobbes dan Jean Jacques Rouseau. Mereka mengatakan bahwa sebelum adanya negara maka tidak ada yang namanya baik dan buruk, penjelasannya adalah sebuah negara itu bukan hanya asal tercipta dengan sendirinya, melainkan lewat sosial kontrak dimana masyarakat lewat persetujuan bersama mengorbankan hak-hak tertentu untuk melindungi hak-hak lainnya. Sampai terciptanya *Common Good* yang menjadi pertanda munculnya moralitas publik di daerah tersebut sehingga indikator baik dan buruk menjadi lebih jelas. Dengan begitu jelas bahwa tidak ada baik buruk menurut hakikatnya kata mereka.

3. Teori pilihan bebas Tuhan

Teori yang beranggapan bahwa moralitas ditentukan oleh kehendak bebas dari Tuhan yang bisa dikatakan bahwa moralitas mengenai apa yang baik dan buruk seperti yang kita kenal sekarang ini baik yang tertulis atau yang tertanam di dalam ide asal mengenai moral adalah hasil dari nilai yang Tuhan ciptakan sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan tidak memiliki kontradiksi di dalamnya sehingga tidak mungkin Tuhan akan memerintahkan apa yang tidak mungkin Ia perintahkan.

¹⁸ Ibid, h.104.

John Duns Scotus berpendapat bahwa semua keharusan itu berasal dari kehendak bebas Tuhan dan bahwa perbuatan seperti perzinahan dan kejahatan pembunuhan pada asal atau hakikatnya adalah buruk. Andai kata hal tersebut tidak Tuhan tetapkan sebagai suatu hal yang buruk menurut hakikatnya maka mereka tidak akan menjadi buruk sehingga dapat disimpulkan bahwa dia mempercayai moralitas intrinsik, tetapi tidak percaya kebenaran dan kesalahan intrinsik.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas terdapat 3 sumber dimana moralitas itu terbentuk yaitu kebiasaan manusia, hukum negara, dan kehendak bebas Tuhan. Kebiasaan manusia biasanya bisa disebut sebagai sebuah budaya, seperti kebiasaan orang Jawa ketika berbicara kepada yang lebih tua harus memakai tata bahasa yang sudah disediakan untuk berkomunikasi dengan yang lebih tua dengan tujuan untuk penghormatan.

Moralitas yang berasal dari hukum negara, sebagai contoh Indonesia yang terdiri dari banyak etnik dan budayanya sendiri-sendiri dan dengan adanya negara ada beberapa hal yang harus dikerucutkan untuk menjadi hukum publik dan mempersatukan beberapa pemikiran dengan satu pedoman moral bersama seperti Pancasila.

Moralitas yang berasal dari kehendak bebas Tuhan merupakan cipta karya Tuhan sebagai esensi absolut. Tuhan menciptakan moralitas intrinsik seperti yang tahu seperti moralitas buruk sebagai contoh pemerkosaan dan pembunuhan. Demikian ketika Tuhan menciptakan suatu moral intrinsik dimana hakikat dari suatu moral tersebut menjadi buruk atau baik, Tuhan tidak bisa atau berlaku berkebalikan dengan diri-Nya dengan melakukan perubahan terhadap moralitas intrinsik tadi menjadi kebalikannya. Seperti pemerkosaan yang hakikatnya buruk menjadi baik, karena tidak ada kontradiksi dalam diri Tuhan.

¹⁹ Ibid.

E. Moralitas Pancasila

Pancasila dapat diartikan secara etimologis berasal dari bahasa sansekerta yaitu panca yang berarti lima dan syla yang berarti sendi, alas, atau dasar. Jika disatukan pancasila dapat diartikan lima dasar, lima sendi atau lima alas.²⁰

Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah kekokohan masyarakat Indonesia dari nenek moyang turun-temurun ke anak cucu yang sudah ada lama, hanya saja sempat terkubur oleh kebudayaan Barat.²¹

Menurut Muh. Yamin menyebutkan bahwa Pancasila bersumber dari kata Panca yang berarti lima, sedangkan Sila yang berarti dasar, dominasi perilaku yang fundamental dan benar. Dengan begitu Pancasila ialah lima dasar yang menyimpan serta pengaturan mengenai budi pekerti yang fundamental dan benar.²²

Notonegoro sedikit memiliki pedapat yang berbeda, menurutnya Pancasila adalah dasar pemikiran Indonesia, oleh sebab itu dapat disebutkan bahwa Pancasila merupakan pemikiran dan ajaran negara yang dijadikan tumpuan yang dapat membentuk hidup bangsa, sebagai dasar negara, karakter negara, perhimpunan dan kepaduan.²³

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa pancasila dapat diartikan sebagai pengantar filosofi Indonesia. Selain itu Pancasila sebagai pedoman kaidah atau petunjuk berperilaku yang baik dan pemersatu hidup bangsa Indonesia. Dengan pengambilan peraturan dari pancasila sebagai pedoman atau petunjuk berperilaku yang baik, maka perasaan tidak adil terhadap sesuatu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pancasila sebagai dasar negara memberikan penjelasan atau gambaran yang sangat jelas bahwa peraturan haruslah dapat digunakan dan diterima oleh banyak masyarakat. Peraturan

²⁰ Sutoyo, Anita Trisiana, dan Siti Supeni, *Pendidikan Moral Berbasis Pancasila*, ed. Dewi Ratna Nurhayati, 1 ed. (Solo: Percetakan Kurnia, 2020), h. 01.

²¹ Fannia Sulistiani Putri dan Dinie Anggtaeni Dewi, "Implementasi Pancasila Sebagai Sistem Etika," *Journal of Education, Psychology, and Counseling* 3, no. 1 (2021), h. 178.

²² Ibid.

²³ Ibid.

atau hukum tersebut diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hakikatnya merupakan refleksi luhur dari perilaku dan karakter bangsa Indonesia yang seharusnya.

Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki beban secara moral untuk mengimplementasikan pancasila dalam kehidupannya tanpa terkecuali para pengampu kepentingan tertinggi. Sehingga hanya sekedar mengetahui saja tidak akan cukup. Mengetahui Pancasila harus dibarengi dengan peresapan, kemudian menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.²⁴

Nilai-nilai pancasila yang hendak diimplementasikan di kehidupan sehari-hari akan lebih baik jika sebelumnya mengetahui mengenai nilai-nilai apa yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Mulai dari Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sampai kepada sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, nilai yang terkandung di dalamnya ialah kita sebagai manusia itu merupakan ciptaan Tuhan dan wajib menjalankan perintah-Nya. Dalam sila ini masyarakat memiliki kebebasan memeluk agama apapun yang telah diakui oleh pemerintahan Indonesia.²⁵ Bukan hanya berhak memilih agama apapun alam kata lain bebas memeluk agama apapun, tapi juga diharuskan memiliki sifat toleransi dalam hal beragama.²⁶

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai yang terkandung di dalamnya ialah kita sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dalam hal mencari keadilan di mata hukum.²⁷ Sebagai manusia yang bermartabat diwajibkan kepada kita untuk mementingkan kepentingan bersama serta sikap saling menghargai.²⁸

Sila ketiga persatuan Indonesia, nilai yang terkandung di dalamnya sudah sangat jelas tersirat bahwa persatuan menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi dengan kondisi

²⁴ Sutoyo, Trisiana, dan Supeni, *Pendidikan Moral Berbasis Pancasila*, h. 32.

²⁵ Aini Shifana Savitri dan Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Di Era Globalisasi," *Inventa : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 5, no. 2 (2021), h. 169.

²⁶ D.S. Hanifa dan D.A. Dewi, "Implementasi Pancasila Terhadap Moral Manusia Di Era Revolusi Industri 4.0," *Qalam : Jurnal Ilmu Kependidikan* 10, no. 1 (2021), h. 21.

²⁷ Savitri dan Dewi, "Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Di Era Globalisasi."

²⁸ Hanifa dan Dewi, "Implementasi Pancasila Terhadap Moral Manusia Di Era Revolusi Industri 4.0."

geografis negara Indonesia yang sangat luas dan berpulau-pulau menyebabkan beberapa kendala mulai dari banyaknya perbedaan akibat dari kondisi geografis yang berbeda. Karena kita telah meneguhkan pendirian membentuk negara NKRI maka harus dibarengi dengan komitmen bersama membentengi keberagaman.²⁹

Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, nilai yang terkandung didalamnya ialah bahwa demokrasi harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pengambilan keputusan/suatu kebijakan penting untuk mewujudkan negara demokrasi. Konstitusi mengamanatkan untuk mewujudkan negara yang demokratis, dimana kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, karena rakyat merupakan objek pendukung pokok negara.

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai yang terkandung di dalamnya ialah bahwa setiap manusia warga masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama terlepas dari perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, kaya atau miskin dan yang memiliki jabatan penting atau tidak. Adil yang dibicarakan dalam hal ini lebih kepada terpenuhinya haknya sebagai manusia dan juga warga negara Indonesia. Seperti halnya dalam penegakan hukum, kesejahteraan, tidak mendapatkan tekanan dari pihak tertentu, dan dalam hal pendidikan.³⁰

Pada akhirnya setelah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebuah kewajiban bagi seorang warga negara untuk mengimplementasikan apa yang terkandung di dalam badan tubuh Pancasila. Karena secara tidak sadar identitas luhur telah secara jelas tergambar di dalam Pancasila sebagai dasar ideologi negara.

²⁹ Ibid, h. 21.

³⁰ Ibid, h.22.

BAB IV

MORAL DALAM PEMIKIRAN JEAN PAUL SARTRE

A. Pandangan Moral dalam Buku *Existentialism is a Humanism*

Sartre di narasi awal bukunya dengan sedikit menjelaskan kenapa dia membuat sebuah kuliah khusus dengan pembahasan mengenai pembelaannya dari orang-orang terhadap pemikirannya. Sartre sendiri membukanya dengan menjabarkan satu persatu kritik beberapa orang terhadap pemikirannya. *For example, according to Miss Mercier, a Catholic critic, we have forgotten the innocence of a child's smile.*¹ Merupakan salah satu kritik yang diterima oleh Sartre.

Sartre sangat menyayangkan mengenai suatu fenomena dimana banyak orang yang mengkaitkan sesuatu yang buruk dengan eksistensialisme. Seperti dikatakan pada bukunya ” *Recently someone told me about a lady who, whenever she inadvertently utters some vulgar expression in a moment of anger, excuse herself by saying (“I think I,m becoming an existentialist”).*”² Demikian entah bagaimana disisi lain ada sisi positif semakin dikenalnya istilah eksistensialis, namun disisi lain dengan semakin luasnya istilah eksistensialisme semakin banyak juga yang salah paham terhadapnya, hingga sampai pada perspektif negatif terhadap eksistensialisme.

Beberapa peristiwa diatas cukup menjadi pemicu dari seorang Jean Paul Sartre untuk angkat suara dalam kuliahnya di *Club Maintenant* di Paris. Memang tak bisa dipungkiri bagi Sartre yang sudah menggeluti dan menjadi seorang aliran eksistensialisme, ketika eksistensialisme disalahartikan oleh banyak orang untuk tidak buka suara dan meluruskan mengenai pemikirannya dan apa itu eksistensialisme.

Sartre terkenal dengan pemikirannya mengenai eksistensi mendahului esensi. Menurutnya, manusia itu harus “ada” lebih dahulu sebelum adanya esensi dari manusia.

¹ Jean Paul Sartre, *Existentialism Is a Humanism*, ed. John Kulka, 1 ed. (London: Yale University Press, 2007), h. 17.

² Ibid, h.18.

Dengan pemikirannya yang seperti itu dia menjelaskan bahwa sebelum adanya esensi, manusia harus sadar akan keberadaannya sehingga dia bisa memahami esensi atau makna dari keberadaannya.

Kesadaran akan esensi tersebut pada akhirnya akan membuat manusia sadar mengenai betapa bebasnya dirinya, tapi dalam hal ini perspektif Kristen menganggap bahwa dalam pemikiran Sartre setiap orang dapat melakukan apa yang dia ingin, sehingga dalam hal ini setiap orang tidak dapat menyalahkan sudut pandang atau tindakan orang lain.³

Sartre menjelaskan kebebasan yang dimaksud bukanlah bebas absolut yang melupakan orang lain. Manusia hanya akan “ada” ketika dia dapat memproyeksikan dirinya sendiri terlepas dari keberadaan orang lain. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa kesadaran akan dirinya tidak berasal dari orang lain, melainkan berasal dari dirinya sendiri ingin memproyeksikan dirinya seperti apa. Dengan begitu manusia baru bisa melakukan pemrosesan kehendak hanya setelah kita memutuskan siapa diri kita.⁴

Sartre melanjutkan bahwa jika benar eksistensi mendahului esensi, maka manusia bertanggung jawab menenai “ada”nya. *And when we say that man is responsible only for his own individuality, but that he is responsible for all men.*⁵ Dengan begitu eksistensialisme dalam hal ini pertama kali mempengaruhi manusia untuk mengetahui siapa dirinya dan bertanggung jawab penuh terhadap dirinya. Apa yang dimaksud bertanggung jawab atas dirinya bukan apa adanya, tetapi juga semua orang.

Kita mungkin akan setuju ketika kehendak atau pilihan yang kita ambil pasti memiliki resiko pada suatu waktu, apa yang kita pilih atau kehendaki akan membawa suatu citra atau gambaran tertentu. Seperti ketika seorang laki-laki memilih untuk menikah, lalu berselingkuh. Dengan begitu citra yang terbangun secara tidak sadar adalah laki-laki rawan untuk berselingkuh meski ketika sudah menikah. Untuk permissalan positifnya, seperti ketika salah

³ Jean Paul Sartre, *Eksistensialisme Dan Humanisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 35.

⁴ Ibid, h. 45.

⁵ Sartre, *Existentialism Is a Humanism*, h.23.

seorang pemuda yang rantau yang memutuskan untuk berperilaku sopan santun di tempat rantauan, maka citra yang terbangun turut mempengaruhi asal tempat tinggal pemuda tersebut. Demikian semakin jelas bahwa setiap kehendak yang dipilih turut berpengaruh terhadap orang-orang disekitarnya.

Terkesan berat memang jika semua apa yang kita putuskan atau kehendaki turut berpengaruh terhadap yang lain, sehingga kita harus berpikir lebih keras lagi kedepan mengenai kehendak atau keinginan apa yang akan kita ambil. Ketertekanan ini berakibat pada suatu perasaan menderita karena harus memikirkan mengenai efek apa atau citra apa yang mempengaruhi sekitar lewat keputusan apa yang akan ia ambil. Sartre menyebut seseorang yang dengan keras menutupi dirinya bahwa dia sedang tidak menderita merupakan perilaku penipuan diri.⁶

Sartre memberikan perumpamaan seorang pemimpin militer yang bertanggung jawab terhadap pasukannya dan jalannya perang. Pada suatu saat pemimpin tersebut membuat keputusan untuk mengirimkan sejumlah pasukannya untuk misi bunuh diri demi kelancaran jalannya perang. Perintah tersebut kemungkinan besar adalah perintah dari atasannya, namun pilihan untuk mengikuti secara utuh atau melakukan sedikit improvisasi terhadap perintah tersebut sehingga korban bisa diminimalkan adalah keputusannya sendiri. Tentunya dalam menafsirkan perintah dari atasannya tersebut, dia menderita. Semua pemimpin pasti merasakannya, namun penderitaan tersebut bukan menghalangi dia dalam bertindak, melainkan sebagai syarat dari kondisi dia dalam mengambil tindakan. *It is this kind of anguish that existentialism describes, and as we shall see it can be made explicit through a sense of direct responsibility toward to the other men who will be affected by it. It not a screen that separates us from action, but a condition of action it self.*⁷

Begitu pun dengan pengingkaran, merupakan satu diantara tiga kata yang melekat dalam kehidupan manusia. Yang pertama penderitaan yang sudah dijelaskan di atas, yang

⁶ Sartre, *Eksistensialisme Dan Humanisme*, h. 51.

⁷ Sartre, *Existentialism Is a Humanism*, h. 27.

kedua adalah pengingkaran, dan yang ketiga adalah keputusan. Pengingkaran merupakan salah satu kata favorit dari Heidegger, seperti yang sudah kita tahu bahwa pengingkaran yang dimaksud dalam eksistensialisme yang dibawa oleh Sartre adalah mengenai Tuhan, bahwa manusia itu sendirian dan bertanggung jawab atas apa yang datang kepada dan pergi dari dirinya, dalam hal ini adalah nilai. Nilai yang dimaksud adalah sebuah nilai yang dalam proses terciptanya nilai adalah oleh cipta tangan manusia. Tanpa dalih campur tangan dari Tuhan, sehingga manusia memiliki tanggung jawab penuh terhadap apa yang dia lakukan semenjak manusia terlempar ke dalam dunia.⁸

Kaum eksistensialis tidak mempercayai hasrat atau pun nafsu yang menggiring manusia menuju sesuatu yang disebut sebagai nasib atau takdir sehingga menjadi dalih perlindungan manusia terhadap keadaan yang sedang menimpanya. Dengan tambahan bahwa kaum eksistensialis menurut Sartre tidak mempercayai bahwa terdapat tanda-tanda yang dapat membantu manusia dalam memilih tindakan dalam hidupnya. Menanggapi hal ini umat katolik akan mengatakan bahwa semua itu ada tanda-tandanya, tapi menurut Sartre "*Be that as it may, it is who chooses what those signs mean*"⁹, bahwa meskipun ada tanda-tanda yang dapat membantu manusia dalam hidupnya, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penafsirannya, dia sendirilah yang memiliki kendali dalam menafsirkan tanda tersebut.

Manusia dalam kehidupannya di hadapkan terhadap beberapa pilihan dalam hidupnya, pada akhirnya harus melakukan pemilihan terhadap salah satu dari sekian banyak pilihan dan menghadirkan satu yang paling ideal bagi dirinya. Oleh karena pilihan yang kita ambil sering kali tidak sejalan seperti apa yang diharapkan, manusia cenderung kembali mengingat mengenai pilihan-pilihan terdahulu kemudian meratapi tentang apa yang telah dipilih pada saat itu. Begitulah pengingkaran yang dengan adanya pengingkaran terciptalah apa yang kita sebut sebagai penderitaan.¹⁰

⁸ Ibid, h. 28.

⁹ Ibid, h. 33.

¹⁰ Ibid, h. 34.

Adapun keputusan, menurut Sartre adalah suatu kata yang memiliki artian yang sederhana dimana kita harus membatasi diri hanya pada perhitungan yang kita lakukan pada kemungkinan-kemungkinan yang dapat atau berada pada kuasa kita.¹¹ Manusia seringkali ketika dalam bertindak atau mempunyai keinginan tidak dapat dipungkiri memiliki kecenderungan untuk bergantung pada orang lain. Seperti halnya ketika seseorang sedang ingin bertemu dengan temannya di suatu tempat makan dan temannya dalam perjalanan menggunakan transportasi umum. Orang itu berharap jika transportasi umum tersebut tidak mengalami suatu hal yang dapat menghambat kehadiran temannya. Dan jelas hal tersebut berada di luar kendalinya ketika berharap transportasi yang ditumpangi temannya tidak akan menemui hambatan.

Menurut Sartre dengan bergantung dengan orang lain adalah sesuatu yang salah, apalagi orang tersebut orang yang tidak dikenal olehnya. Menurutnya bergantung dengan orang lain sama halnya dengan berharap bahwa transportasi tidak akan menemui suatu hambatan di jalan. Dengan alasan Sartre tidak bisa mengontrol terhadap kemungkinan-kemungkinan yang berada di luar kuasa dirinya. Maka dari itu Sartre beranggapan dia harus membatasi dirinya pada sesuatu yang dia lihat.

Sartre menambahi bahwa tidak ada jaminan bahwa jika dia suatu saat mati maka akan ada yang akan meneruskan perjuangannya atau paling tidak menyempurnakan apa yang dia mulai, karena pada dasarnya manusia memiliki kebebasan dalam memilih jalan hidupnya sendiri. Perlu menjadi catatan bahwa bukannya tidak mungkin dia tidak bisa bergabung dengan suatu kelompok tertentu atau partai, tapi yang menjadi titik penting adalah bahwa apa yang bisa dia upayakan akan diupayakan dengan sekuat tenaga.¹²

Optimisme tergambarkan dari kata-kata yang Sartre lontarkan untuk menjelaskan pemikirannya. Sartre mengatakan "*In light of all this, what people reproach us for is not pessimism, but the sternness of our optimism.*" Karena menurut Sartre ketika banyak orang

¹¹ Sartre, *Eksistensialisme Dan Humanisme*, h. 69.

¹² *Ibid*, h.72.

yang mengkritik mengenai penokohan dalam karya-karya eksistensialis, mereka (kaum eksistensialis) cenderung menggambarkan tokoh mereka dengan tidak berdaya, lemah, pengecut, dan cenderung jahat.

Sartre mengambil contoh penokohan Zola, bahwa ketika membacanya kita harus menyalahkan lingkungan atau masyarakat, yang bersifat turun-temurun, dan masalah kejiwaan. Kita akan diyakinkan bahwa hal tersebut kita tidak bisa berbuat apa-apa ataupun dirubah, tapi eksistensialis akan menggambarkan seorang yang pengecut bukan berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi kepengecutannya adalah tanggung jawab dirinya sendiri yang terlihat dan dibuktikan oleh tindakannya.

Sartre beranggapan tidak ada mentalitas yang bernama pengecut, tapi memang ada mentalitas yang rapuh dan mudah gugup. Tapi tidak dengan mentalitasnya yang mudah gugup atau rapuh, maka bisa dikatakan bahwa dia merupakan pengecut. Pengecut dapat dikenali lewat perbuatannya seperti halnya menyerah dan melarikan diri.

Seseorang yang pengecut akan bertanggung jawab terhadap kepengecutannya. Dia tidak terlahir dengan kondisi sebagai seorang pengecut, begitu pula seorang pemberani tidak begitu saja terlahir sebagai seorang pemberani. Ada kemungkinan bahwa seorang pengecut akan menanggalkan kepengecutannya. Seseorang dapat saja berubah, entah itu menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik. Karena seorang pengecut menjadikan dirinya sebagai pengecut disebabkan karena tindakannya, begitu pula pemberani menjadikan dirinya pemberani disebabkan karena tindakannya. Untuk menjadi seperti apa atau jenis manusia seperti apa adalah hak dari manusia itu dan menjadi tanggung jawab dirinya ketika dia memilih untuk menjadi jenis manusia yang seperti apa.¹³

Pada akhirnya Sartre sampai ke sebuah kesimpulan atau bisa dikatakan sebagai rangkuman dari beberapa pernyataan atau pembelaan Sartre di atas. Bahwa filsafat ini tidak bisa digolongkan sebagai filsafat ketenangan. Karena mendefinisikan manusia lewat tindakannya,

¹³ Ibid, h. 79.

begitu juga tidak bisa digolongkan sebagai sesuatu yang pesimis. Bahkan filsafat ini sangat optimis karena menyatakan takdir manusia berada di tangannya sendiri.

Eksistensialisme Sartre mendapat serangan yang Sartre anggap bahwa mereka salah paham, karena mereka menganggap eksistensialisme Sartre memenjarakan manusia ke dalam subjektifitas individualnya. Sartre membela dengan membenarkan bahwa memang titik berangkat dari filsafat ini adalah subjektifitas individu, tapi bukan berarti borjuis. Karena disini kaum eksistensialis berusaha mendasarkan doktrin mereka kepada kebenaran. Titik tolak menurut Sartre ada pada doktrin “saya berpikir maka saya ada”, sebagai suatu kebenaran mutlak. Ketika seseorang ingin menentukan suatu kemungkinan harus memiliki sesuatu yang disebut kebenaran dan agar satu kebenaran ada harus ada terlebih dahulu kebenaran absolut. Dan menurut Sartre kebenaran itu mudah ditemukan, dapat dijangkau oleh semua orang. Kebenaran itu berisi kesadaran diri manusia.¹⁴

Eksistensialisme ini bahkan menurut Sartre sangat manusiawi, karena dalam hal ini manusia tidak dikatakan atau menjadikan manusia sebagai objek. Sartre menjelaskan bahwa dia ingin menjadikan sebuah kerajaan manusia dimana berbeda dengan dunia material. Dan sejalan dengan hal ini teori subjektivitas yang digunakan sebagai standar kebenaran tidak sepenuhnya bersifat individual, melainkan dalam proses kesadaran akan diri sendiri juga dengan sadar menyeret keberadaan orang lain. Sehingga ketika seseorang menemukan dirinya secara langsung, dia juga menemukan orang lain sebagai syarat kondisi keberadannya.¹⁵

Menemukan orang lain bukan berarti mengenal dengan dekat perihal banyak sisi detail mengenai orang tersebut. Dengan informasi yang mencukupi kita dapat mengenal atau mendefinisikan seseorang sebagai sesuatu. Karena pengkategorian setiap orang berbeda, bukan berarti berbeda secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa manusia dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang sama atau dengan kata lain universal.

¹⁴ Sartre, *Existentialism Is a Humanism*, h. 40.

¹⁵ *Ibid*, h. 41.

Universalitas yang dimaksud oleh Sartre bukanlah sesuatu yang diberikan melainkan sesuatu yang dibangun. *I construct it by understanding every other man's project, regardless of the era in which he lives*¹⁶, bisa dipahami bahwa setiap konstruk manusia sebagai individu maupun kelompok dapat dengan mudah dipahami karena tidak peduli di era manapun dengan pasti dapat dikatakan memiliki konstruk atau bangunan yang sama dengan yang lain.

Sartre melanjutkan dengan kritikan orang lain bahwa “jika memang demikian kita yang memberi nilai terhadap sesuatu, maka kita tidak perlu menganggap serius hal tersebut. Dengan menyesal Sartre membalas bahwa hal tersebut sangat menyesalkan, karena memang begitulah hidup. Kehidupan hanya sesuatu yang kosong sampai kita mengisinya. Sudah menjadi tugas kita untuk memaknai hidup kita dan tidak lain makna tersebut anda sendiri yang memilih.”¹⁷

Sartre lebih lanjut lagi mendapat suatu kritikan yang berisi mengenai kerancuan yang dirasa ketika dalam salah satu karyanya yang bernama “Muak”, Sartre menghina teori humanisme tertentu dan di lain kesempatan mengatakan eksistensialisme adalah suatu humanisme. Sartre memberikan penjelasan bahwa humanisme yang mendewakan manusia, itu adalah merupakan suatu keesalahan. Bagaimana bisa seseorang mengatakan bahwa “manusia itu luar biasa” atas jasa orang-orang tertentu yang memiliki penemuan, kecerdasan dan kehebatan dalam suatu bidang. Ini lebih seperti memberi suatu nilai terhadap manusia hanya karena perbuatan paling mengagumkan orang-orang tertentu.

Artian lain Humanisme adalah manusia sepanjang hidupnya berada di luar dirinya sendiri, karena manusia memproyeksikan dan kehilangan dirinya adalah manusia direalisasikan dan disisi lain dalam mengejar tujuan transenden dia bisa mengada. *This link between transcendence as constitutive of man (not in the sense that God is transcendence, but in the sense that man passes beyond himself) and subjectivity (in the sense that man is not an island unto himself but always present in a human universe) is what we call “eksistensialist*

¹⁶ Ibid, h. 43.

¹⁷ Sartre, Eksistensialisme Dan Humanisme, H. 102.

humanism".¹⁸ Ajaran semacam inilah humanisme, karena menurut Sartre, mereka mengingatkan manusia bahwa tidak ada legislator selain dirinya sendiri, dan dia harus dalam keadaan terbengkalai, membuat pilihannya sendiri, dan juga karena dia menunjukkan bahwa itu bukan dengan berbalik ke dalam, tetapi dengan terus-menerus mencari tujuan di luar dirinya dalam bentuk pembebasan, atau pencapaian khusus, bahwa manusia akan menyadari dirinya sebagai manusia.

B. Konsep Moral Jean Paul Sartre dan Relevansinya dengan Konsep Pancasila

Sartre dengan teguh membela bahwa Eksistensialismenya tidak menyeleweng dari sisi kemanusiaan, hanya karena ada beberapa yang tidak sesuai pada masa itu terkhusus mengenai dominasi gereja. Dimana Sartre secara lantang juga menentang mengenai campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia yang jelas tidak disukai oleh mayoritas kristiani.

Sartre mengatakan bahwa eksistensialisme adalah sebuah humanisme, dan mendapatkan banyak serangan. Keteguhan Sartre tetap pada porsinya membela bahwa eksistensialisme dengan kesadaran individualnya bukan hanya sadar dengan diri sendiri, melainkan dengan kesadaran akan diri sendiri sekaligus sadar akan orang lain di sekitar.¹⁹

Moralitas yang dibawa Sartre secara umum memang sangat logis, namun beberapa hal perlu diluruskan kembali karena bagaimana pun moralitas yang dibawa oleh Sartre tidak bisa dipakai pada beberapa tempat dan budaya tertentu. Indonesia mungkin salah satunya, karena satu dan banyak hal tidak sesuai dengan dasar ideologi negara yaitu Pancasila.

Pancasila menurut Christian Siregar adalah pondasi bersama bagi setiap komponen untuk menjadi bagian dari masyarakat dalam beraktifitas baik secara individu maupun bersosial.²⁰ Dengan ini Pancasila adalah bagian terpenting dari kehidupan bangsa dan negara, tanpa terlepas dari kejadian bersejarah yang menjadi awal tercetusnya. Sehingga apapun yang

¹⁸ Sartre, *Existentialism Is a Humanism*, h. 53.

¹⁹ Ibid, h. 23.

²⁰ Putri dan Dewi, "Implementasi Pancasila Sebagai Sistem Etika.", h. 181

bertentangan dengan nilai-nilai filosofis dari Pancasila harus kita denga keras menentangnya atau paling tidak menjauhinya.

Konsep moral yang coba dihadirkan Sartre ketika membela dan meluruskan mengenai beberapa hal dalam eksistensialismenya pada bagian-bagian tertentu bertentangan dengan Pancasila. terutama yang paling fatal adalah pada bagian sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sangat fatal karena sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar dari hierarki sila-sila Pancasila setelahnya. Sehingga hal tersebut sangat tidak memungkinkan untuk menghapuskan kehadiran Tuhan dalam setiap tindakan masyarakat Indonesia.²¹

Sartre lebih lanjut lagi tidak setuju dengan adanya imperatif moral yang mana secara tidak langsung berarti Pancasila sebagai landasan moral dan ideologi bangsa ditolak dan tidak disetujui karena menurutnya manusia berkebebasan memiliki kehendaknya sendiri dan tidak mempercayai adanya moral universal yang menunjukkan kita harus melakukan apa.²²

Dengan apa yang dikatakan oleh Sartre, bangunan moral menjadi tidak begitu jelas. Meskipun apa yang dikatakan oleh Sartre bahwa setiap individu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, tapi itu tak bisa kemudian menampik kenyataan bahwa mau bagaimana pun hal tersebut tetap hasil pemikiran satu orang yang memiliki potensi bahwa apa yang menjadi keputusannya tidak akan diterima oleh kebanyakan orang. Tentu tidak banyak orang-orang yang memiliki pemikiran yang begitu jenius untuk bisa memikirkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dari apa yang akan dia putuskan untuk orang-orang di sekitarnya.

Keputusan yang secara bebas dibebankan pada individu dengan sekaligus mempertimbangkan keadaan sekitar, sekilas memang memenuhi kriteria dari sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” karena dalam setiap pengambilan keputusan selalu memberikan ruang kepada orang lain sebagai subjek yang akan turut menerima konsekuensi

²¹ Siswanto, “Kesadaran Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Humanisme Jean-Paul Sartre.”, h. 30

²² Yussafina, “Eksistensialisme Jean Paul Sartre Dan Relevansinya Dengan Moral Manusia.”, h. 108

dari apa yang akan dia putuskan.²³ Kondisi ini diperkuat dengan anggapan Sartre bahwa ketika seorang sadar akan keberadaan dirinya, sekaligus juga dengan keberadaan orang-orang disekitarnya. Maka dengan begitu setiap keputusan akan menjadi tanggung jawab bukan hanya kepada dirinya sendiri, melainkan harus mempertimbangkan keberadaan orang lain.

Pengambilan keputusan tersebut dilain sisi juga bertentangan dengan sila ketiga “Persatuan Indonesia”, dimana dalam hal ini Sartre tidak setuju ketika seseorang mencampuri kehidupan suatu individu. Menurut Sartre seorang individu memiliki kebebasan mutlaknya untuk memilih tindakan apa yang akan dia lakukan. Sikap individual ini jelas berlawanan dengan nilai dari sila ketiga. Dalam hal ini kekompakan antara satu dengan yang lainnya sehingga tercipta suatu persatuan, jika pengambilan keputusan secara pribadi berlaku seperti yang Sartre inginkan, berbeda antara satu dengan yang lainnya yang akan terjadi malah sebaliknya yaitu konflik. Meskipun dalam hal ini satu individu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, itu tidak akan memecahkan masalah yang terjadi.

Demikian juga pasal keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengambilan keputusan secara individu yang merupakan pelanggaran terhadap sila keempat, dimana sila ini terdapat 3 nilai yang merepresentasikan dirinya yaitu kebebasan, kekeluargaan, dan mufakat yang berarti pengambilan keputusan secara individu dimana kesejahteraan manusia secara umum dipertaruhkan, tidak bisa dibenarkan.²⁴

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan nilai terakhir dari kelima sila dalam Pancasila yang membahas mengenai keadilan dalam hal sosial dengan menjunjung persamaan derajat dengan sesama manusia disekitarnya. Dalam hal adil disini

²³ Savitri dan Dewi, “Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Di Era Globalisasi.”, h. 169

²⁴ Saidurrahman dan Arifinsyah, *Pancasila Moderasi Negara dan Agama Sebagai Landasan Moral Bangsa* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 92.

juga berarti bebas dari berbagai bentuk tekanan dari berbagai pihak sehingga hak-hak dan kewajiban dengan seluruh bagiannya sebagai warga negara terpenuhi.²⁵

Pemikiran Sartre yang mengatakan bahwa ketika manusia sadar mengenai diri sendiri, sekaligus kesadaran tersebut menyeret keberadaan orang lain dalam kesadarannya. Jadi ketika seorang mulai menyadari keberadaannya, proses pengambilan keputusan menjadi lebih berhati-hati dengan adanya keberadaan orang lain. Sehingga dia tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri melainkan juga bertanggung jawab atas apa yang akan menimpa seseorang lewat pengambilan keputusannya. Dengan begitu salah satu bagian pemikiran Sartre mengenai konsep moral dalam eksistensialismenya mengalami kecocokan dengan nilai dari sila kelima dalam Pancasila.

Subjektifisme Sartre dalam hal ini ditolak oleh Pancasila. Sifat gotong royong dan melibatkan banyak orang dalam banyak kesempatan sudah merupakan sifat bangsa Indonesia sedari awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih lanjut lagi Soekarno mengatakan bahwa Indonesia didirikan untuk menjamin kepentingan semua warga Indonesia, apapun agamanya, golongan, sukunya, dan keadaan ekonominya.²⁶

Beberapa ketidakcocokan diatas terhadap Pancasila memang tidak bisa dihindari, meski hanya bisa cocok dengan dua dari kelima sila yang ada yaitu sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”. Ini memberi pesan bahwa pemikiran yang dibawa Sartre memang hampir keseluruhannya bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, tapi masih ada yang cocok dan bisa diambil dari pemikiran Sarte.

C. Analisis Moral Jean Paul Sartre

²⁵ Sri Rahayu Amri, “Pancasila Sebagai Sistem Etika,” *Jurnal Voice of Midwifery* 08, no. 01 (2018), h. 763.

²⁶ Agustinus Wisnu Dewantara, “Pancasila dan multikulturalisme indonesia,” *Studia Philosophica et Theologica* 15, no. 2 (2015), h. 120.

Sumber moral secara umum telah dibahas sebelumnya dibedakan menjadi tiga yaitu kebiasaan manusia, hukum-hukum negara, dan kehendak bebas Tuhan.²⁷ Moral yang dibawa Sartre sekilas tidak memiliki kesamaan dengan ketiga sumber moral tersebut. Dibutuhkan sebuah analisis untuk melihat apakah moral yang dibawa Sartre lewat eksistensialismenya memiliki kesamaan atau kecocokan dengan ketiga sumber moralitas tersebut.

1. Teori kebiasaan manusia

Teori ini berkata bahwa semua moralitas itu berasal dari kebiasaan manusia yang sudah berlangsung dalam waktu yang sudah lama dan mengakar dalam suatu sistem masyarakat tertentu. Ada pendapat bahwa moralitas dipaksakan oleh orang-orang yang memiliki suatu kuasa atau kecerdasan tertentu untuk menundukkan rakyat biasa.²⁸

Friederich Nietzsche memiliki pemikiran yang sama dengan argumen di atas, bahwa di zaman dahulu moralitas baik dan buruk itu belum ada. Kelompok manusia di bagi menjadi yang kuat dan lemah, yang kuat mendominasi yang lemah dengan kekuatannya seperti perempuan yang lemah lembut, penurut, dan sabar. Bagi yang lemah hanya bisa menurut atau terpaksa tunduk kepada yang kuat, hingga muncullah moralitas majikan dan moralitas budak. Ketika Katolik muncul, dengan jumlah yang banyak moralitas budak menang. Menurut Nietzsche, hal ini merupakan bencana yang tak terhitung untuk masyarakat, sehingga sudah menjadi kewajiban dari masyarakat aristokrat untuk memunculkan *Uebermensch* yang akan mengembalikan moralitas bendora yang menurutnya *Uebermensch* itu akan mengatasi segalanya sendiri mengenai baik dan buruk.²⁹

Berbeda dengan Nietzsche, Herbert Spencer memiliki pemikiran bahwa moral itu berkembang. Dia menaruh konsep evolusi moralitas pada hewan, sebagaimana dia percaya bahwa manusia berevolusi dari hewan. Moralitas juga berkembang seperti cara

²⁷ Poespoprodjo, *Filsafat Moral : Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, h. 104.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid, h. 104.

bebuat yang dianggap berguna, kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan pada suku primitif. Dengan adanya perkembangan atau majunya peradaban, semakin tersaring kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjadi sistem moral yang kita tahu sekarang. Karena proses evolusi belum berhenti maka moralitas tersebut masih akan ikut berevolusi menjadi lebih tinggi lagi.³⁰

2. Teori hukum-hukum negara

Teori ini beranggapan bahwa moralitas itu tidak begitu saja baik dan buruk dengan sendirinya melainkan diberikan oleh negara. Filsuf yang memiliki pemikiran ini adalah Thomah Hobbes dan Jean Jacques Rousseau. Mereka mengatakan bahwa sebelum adanya suatu negara belum ada yang bisa disebut baik dan buruk.

Masyarakat dengan persetujuan umum mengorbankan hak-hak tertentu untuk melindungi haknya yang lain, dengan begitu masyarakat telah melakukan sosial kontrak. Sampai pada suatu *common good* yang menjadi pertanda munculnya moralitas publik sehingga artian baik dan buruk pada daerah tersebut menjadi jelas.

3. Teori kehendak bebas Tuhan

Kehendak bebas Tuhan di sini memiliki arti bahwa setiap moralitas dan konsepsi mengenai baik dan buruk merupakan hasil cipta dari Tuhan sebagai keberadaan yang absolut baik yang tertulis atau yang tertanam dalam ide manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan tidak memiliki satu pun kontradiksi di dalam diri-Nya, sehingga Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan diri-Nya.³¹

John Duns Scotus mengatakan bahwa pemerkosaan dan pembunuhan pada hakikatnya adalah buruk. Jika Tuhan dengan kuasa absolutnya tidak menghendaki hakikat pemerkosaan dan pembunuhan adalah sesuatu yang buruk, maka hakikat tersebut tidak akan pernah buruk. Namun karena Tuhan tidak keji, tidak menipu, dan adil, maka

³⁰ Ibid, h. 105.

³¹ Ibid, h. 110.

Tuhan tidak bisa memerintahkan sesuatu yang berlawanan dengan diri-Nya sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan tidak memiliki kontradiksi.³²

Moralitas yang dibawa Sartre benar-benar berbeda dengan apa yang dijelaskan di atas. Satu hal yang membuat pemikiran tentang moral Sartre tidak bisa digolongkan di salah satu dari beberapa sumber moral di atas adalah bahwa Sartre menolak imperatif moral. Dimana manusia harusnya memilih sendiri tindakannya dan memaknai dirinya sendiri, itulah yang menurut Sarre sebut sebagai kebebasan.³³

Teori-teori di atas secara umum merupakan tergolong dalam imperatif moral. Suatu moral yang sebagai pedoman dan memiliki unsur larangan dan perintah. Hal tersebut yang tidak disetujui oleh Sartre, kebebasan absolut adalah milik manusia. *You are free, so chooshe, in other word invent. No general code ethics can tell you what you ought to do, there are no signs in this word.*³⁴

Dari sekian hal buruk dan ketidakcocokan moral yang dibawa Sartre, masih ada hal positif dari apa yang coba Sarre katakan. Di awal Sartre mengatakan bahwa eksistensialismenya membawa suatu optimisme moral dimana seseorang memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas apa yang keluar dari kehendak bebasnya, dengan kata lain apa yang jadi sebab dari kehendak bebasnya dia bertanggung jawab atas itu.

Manusia cenderung untuk menyalahkan keadaan dimana pada saat tertentu atau pada suatu waktu termakan nafsunya sendiri dan melakukan kesalahan. Disini Sartre tidak percaya terhadap suatu nafsu yang dapat memaksa suatu individu untuk melakukan tindakan tertentu. dia mengatakan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas apa

³² Ibid, h. 112.

³³ Yussafina, "Eksistensialisme Jean Paul Sartre Dan Relevansinya Dengan Moral Manusia.", h. 108.

³⁴ Sartre, *Existentialism Is a Humanism*, h. 33.

yang dia lakukan. Setiap manusia yang berlingung dihadapan nafsu dan menyalahkan keadaan dianggap sebagai suatu pelarian terhadap kebebasannya.³⁵

Ini mengisyaratkan bahwa setiap kali manusia terpuruk dan dalam keadaan yang terpojok sekalipun. Manusia tidak bisa hanya bergantung dengan yang lain atau mengandalkan faktor eksternal lain untuk membantunya bertahan atau paling tidak untuk bangkit dari masalah yang sedang menimpanya. Tidak lain hanya dirinya sendiri yang dapat memberikan dorongan pada dirinya untuk keluar dari masalah yang sedang menimpanya atau paling tidak untuk bangkit dan berhenti untuk terpuruk dalam waktu yang lama.

Urgensi moral tetap menjadi perhatian banyak orang, terlebih lagi dengan semua kemajuan teknologi dan informasi yang ada. Terutama mengenai moral penerus anak bangsa yang lahir dan besar di tengah-tengah gejolak perkembangan pesat teknologi dan informasi. Dalam hal ini perlu penanaman moral dari sejak dini demi mencegah terjadi tindak amoral di masa depan.

Kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan suatu fenomena yang disebut sebagai globalisasi.³⁶ Perolehan informasi yang mudah dengan teknologi yang ringan dan dapat dibawa kemana-mana membuat banyak orang yang kecanduan akan teknologi dan berbagi kemudahn yang ada.

Informasi yang masuk sering kali tidak dapat dikendalikan sehingga beberapa informasi yang sebenarnya belum siap untuk diterima dengan mudahnya dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan dampaknya seperti budaya dan gaya hidup turut berubah. Sedangkan perubahan tersebut sering kali ke arah yang buruk.

Karena kiblat dari kemajuan teknologi dan budaya adalah barat dengan kebanyakan dari budaya yang terlihat adalah yang buruk, sehingga hal-hal seperti mabuk,

³⁵ Ibid.

³⁶ Nurma Atiah, "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Masyarakat 5.0," in *Seminar Nasional Pendidikan PPs Universitas PGRI Palembang 2020*, 2020, h.610.

pemeriksaan, hubungan diluar nikah, dan kekerasan sebagai penyakit moral di masyarakat harus diperangi bersama-sama. Salah satunya adalah dengan pendidikan moral dan agama sebagai bentuk penyikapan secara persuasif. Dengan pendidikan agama, maka nilai-nilai yang bertentangan dengan agama tidak akan bisa masuk dengan mudah begitu saja.

Pendidikan moral, lebih tepatnya pendidikan yang berisikan pengajaran mengenai budi pekerti luhur yang berakar dari adat istiadat, budaya bangsa/negara, dan agama. Institusi yang paling vital dalam hal ini adalah keluarga dimana pondasi awal dari terciptanya moral yang baik. Sehingga ketika dilepas ke institusi pendidikan formal para guru tinggal memoles dan mengokohkan melalui proses pendidikan di bangku sekolah yang sedemikian rupa.³⁷

Instansi pendidikan formal pun tidak selamanya memberikan bekal yang cukup kepada muridnya untuk mengembangkan bakat serta minat dengan maksimal, begitu juga dengan moral siswanya. Begitu banyak tenaga pendidik yang tidak cakap dalam memberikan pembelajaran kepada siswanya, bahkan beberapa diantaranya memiliki ironi dimana hal yang di ajarkan berlawanan dengan sikap pengajar.

Tenaga pengajar sebenarnya juga merupakan korban dari keadaan yang sudah tidak baik, dimana banyak korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan di lingkungan instansi pendidikan formal. Sehingga banyak dari pendidik yang masuk ke instansi pendidikan formal kurang mumpuni dalam mengemban visi dan misi pendidikan.³⁸ Banyak oknum pendidikan yang kemudian tidak memberi pengajaran yang baik dan mencukupi sebagaimana peran seorang guru seharusnya.

Bangunan pendidikan mungkin terlihat baik-baik saja tapi sangat minim sesuatu yang kita sebut dengan keadilan. Jika bangunan pendidikan sebegitu buruknya,

³⁷ Ibid, h. 615.

³⁸ Tanyid, "Etika Dalam Pendidikan : Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan.", h. 246

bagaimana caranya moral bisa sampai kepada murid sebagai seorang anak yang akan meneruskan cita-cita bangsa, sedangkan bangunan pendidikan sedemikian buruknya.

Inilah pentingnya moral pancasila dalam hal ini untuk diamalkan, bukan hanya sekedar dipahami. Mengamalkan itu sesuatu yang wajib untuk semua lini masyarakat Indonesia, apalagi seorang tenaga pendidik yang di kemudian hari akan mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang bermoral Pancasila.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep moral yang ingin Sartre jelaskan lewat buku *Existentialism is a Humanism*, adalah bahwa manusia dengan kesadaran akan keberadaannya juga menyeret keberadaan orang lain dalam kesadarannya, sehingga apa yang dikatakan bersifat individu dalam hal ini tidak benar-benar individu. Jadi ketika dalam proses pengambilan suatu keputusan, hal tersebut selalu berdasarkan pertimbangan efek yang akan diterima orang lain juga, dengan kata lain tanggung jawab yang timbul bukan hanya mengenai keadaan yang menimpa dirinya melainkan juga ketika keputusan tersebut berefek terhadap orang lain. Setiap tindakan berdasarkan rasa tanggung jawab, karena alasan itulah Sartre tidak menganggap takdir itu ada, sebab pilihan manusia adalah yang menuntunnya kepada keadaan tertentu. Jadi ketika seseorang terpuruk karena suatu keputusan yang dibuat dan menyalahkan takdir bisa dianggap sebagai pelarian diri oleh Sartre, karena baginya tidak ada legislator terbaik selain dirinya sendiri.
2. Relevansi konsep moral yang ada dalam buku *Existentialism is a Humanism* milik Sartre banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, dimulai dengan tidak setujunya Sartre dengan imperatif moral yang dalam hal ini Pancasila merupakan imperatif moral, ketidaksetujuan Sartre terhadap keberadaan Tuhan yang bertentangan dengan sila-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa), dan egoisme individual dalam pengambilan keputusan secara pribadi tidak boleh ada tekanan atau kendali dari orang lain yang bertentangan dengan Sila-3 (Persatuan

Indonesia) dan Sila-4 (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan)

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memiliki beberapa saran yang semoga bermanfaat untuk beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Akademik

Penelitian ini bisa dijadikan pijakan bagi penelitian selanjutnya mengenai pemikiran-pemikiran filsafat Barat. Dimana bidang kajian pemikiran filsafat Barat bisa dibilang masih sedikit.

2. Lembaga Pendidikan

Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini bisa menjadi contoh mengenai bagaimana Pancasila harus menjadi pondasi dalam setiap pengambilan keputusan dan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini upaya penyaringan pemikiran filsuf barat Jean Paul Sartre mengenai konsep moral dalam bukunya, dimana banyak bagian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Disamping itu ada bentuk tanggung jawab dan kesetaraan yang masih sesuai dan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar.

3. Masyarakat

Konsep moral yang dibawa Jean Paul Sartre tidak semuanya cocok diterapkan dalam kehidupan masyarakat karena dasar ideologi Pancasila sebagian besarnya nilai yang terkandung di dalamnya bertentangan. Namun bukan berarti tidak ada satu atau dua hal yang tidak bisa diambil, diantaranya adalah rasa tanggung jawab terhadap keputusan diambil berikut dengan konsekuensi yang ada di dalamnya. Sehingga masyarakat lebih memiliki pemikiran yang positif dengan tidak selalu menyalahkan keadaan dan menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan.

Daftar Pustaka

- Amri, Sri Rahayu. "Pancasila Sebagai Sistem Etika." *Jurnal Voice of Midwifery* 08, no. 01 (2018): 760–768.
- Atiah, Nurma. "Pembelajaran Era Disruptif Menuju Masyarakat 5.0." In *Seminar Nasional Pendidikan PPs Universitas PGRI Palembang 2020*, 605–617, 2020.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II Prancis*. 5 ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Budiarto, Gema. "Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral dan Karakter." *Jurnal Pamator* 13, no. 1 (2020): 50–57.
- Dewantara, Agustinus W. *Filsafat Moral : Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Diedit oleh Marcell. 4 ed. Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.
- Dewantara, Agustinus Wisnu. "Pancasila dan multikulturalisme indonesia." *Studia Philosophica et Theologica* 15, no. 2 (2015): 109–126.
- Frimayanti, Ade Imelda. "Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam." *Al-Tadzkiyyah* 8, no. 1 (2017): 83–98.
- Handayani, Sri. "Unggah-unggah Dalam Etika Jawa." UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Hanifa, D.S., dan D.A. Dewi. "Implementasi Pancasila Terhadap Moral Manusia Di Era Revolusi Industri 4.0." *Qalam : Jurnal Ilmu Kependidikan* 10, no. 1 (2021): 17–26.
- Iskarim, Mochamad. "Dekadensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa)." *Edukasi Islamika* 1, no. 1 (2016): 1–20.
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Lavine, T. Z. *From Socrates To Satre*. Yogyakarta: Immortal Publishing dan Octopus, 2020.
- Magnis, Franz, dan Suseno. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. 17 ed. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Mawardi. "Keragu-raguan Terhadap Agama: Wacana Humanisme dan Eksistensialisme." *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 281–290.
- Muzairi. "Kebebasan Manusia dan Konflik dalam pandangan eksistensialime jean paul sartre." *ESENSIA* 13, no. 1 (2012): 39–66.
- Nurlaili, Siti, Waryunah, Yusup Rohmadi, dan Nur Sidik. *Buku panduan skripsi*. Sukoharjo: FUD Press, 2016.

- Pinasang, Dani. "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum UNSRAT* 20, no. 3 (2012): 1–10.
- Poespoprodjo. *Filsafat Moral : Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*. 1 ed. Bandung: Remaja Karya CV, 1986.
- Purnamasari, Elvira. "Kebebasan Manusia Dalam Filsafat Eksistensialisme (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Jean Paul Sartre)." *Manthiq* 2, no. 2 (2017): 119–133.
- Putri, Fannia Sulistiani, dan Dinie Anggtaeni Dewi. "Implementasi Pancasila Sebagai Sistem Etika." *Journal of Education, Psychology, and Counseling* 3, no. 1 (2021): 176–184.
- Ruman, Yutinus Suhardi. "Keteraturan Sosial, Norma, Dan Hukum : Sebuah Penjelasan Sosiologis." *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 2 (2009): 106–116.
- Saidurrahman, dan Arifinsyah. *Pancasila Moderasi Negara dan Agama Sebagai Lamdasan Moral Bangsa*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sartre, Jean Paul. *Eksistensialisme Dan Humanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- . *Existentialism Is a Humanism*. Diedit oleh John Kulka. 1 ed. London: Yale University Press, 2007.
- Savitri, Aini Shifana, dan Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Di Era Globalisasi." *Inventa : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 5, no. 2 (2021): 165–177.
- Setyoningsih, Yunita Dwi. "Tantangan Konselor di era milenial dalam mencegah degradasi moral remaja." In *Seminar Naional Bimbingan dan Konseling*, 2:134–145, 2018.
- Siroj, A Malthuf. "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya." *al-Ihkam* 11, no. 2 (2016): 294–312.
- Siswanto, Dwi. "Kesadaran Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Humanisme Jean-Paul Sartre." *Jurnal Fisafat* 1, no. 1 (1997): 25–32.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 1996.
- Sunarso. "Mengenal Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre Serta Implementasinya Dalam Pendidikan." *Informasi* 36, no. 1 (2010): 1–13.
- Sutoyo, Anita Trisiana, dan Siti Supeni. *Pendidikan Moral Berbasis Pancasila*. Diedit oleh Dewi Ratna Nurhayati. 1 ed. Surakarta: Percetakan Kurnia, 2020.
- Syaparuddin, dan Elihami. "Peranan Pendidikan Nonformal dan Sarana Pendidikan Moral." *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 1 (2019): 173–186.
- Syukri, Ahmad. "Tema Sentral Dalam Pemikiran Jean Paul Sartre." *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 22, no. 1 (2019): 44–59.

- Tambunan, Sihol Farida. "Kebebasan Individu Manusia Abad Dua Puluh: Filsafat Eksistensialisme Sarte." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 18, no. 2 (2016): 215–232.
- Tanyid, Maidiantius. "Etika Dalam Pendidikan : Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan." *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 235–250.
- Wilujeng, Sri Rahayu. "FILSAFAT , ETIKA DAN ILMU : Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan." *Humanika* 17, no. 1 (2013): 79–90.
- Yulianita, Neni. "Implementasi Etika Di Era Globalisasi." *Mimbar : Jurnal Sosial dan Pembangunan* 18, no. 4 (2002): 457–473.
- Yussafina, Diana Mella. "Eksistensialisme Jean Paul Sartre Dan Relevansinya Dengan Moral Manusia." UIN Walisongo, 2015.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah." *Junral Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 249–266.